BANTEN POS
Inspirasi dan Semangat Baru Banten
Rakyat Merdeka Group

PENGAWASAN MBG DISOROT

SERANG, BANPOS – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten masih diwarnai berbagai persoalan operasional. Mulai dari puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkena penghentian sementara atau suspend, hingga terhentinya distribusi makanan akibat kendala pendanaan.

Kondisi tersebut mendapat sorotan akademisi. Pengawasan dan tata kelola program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh agar pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada pencapaian target jumlah penerima manfaat, tetapi juga menjamin kualitas

BACA **PENGAWASAN** HAL - 9

TERSANGKA PENYADAPAN PRESIDEN BERTAMBAH

JAKARTA, BANPOS - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan anggota Polri bernama Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal. Penetapan ini menambah deretan tersangka kasus yang sama menjadi empat orang anggota Polri.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11) malam, mengatakan bahwa Slamet berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Slamet disebut berperan memberikan perizinan dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga para pengusaha. “Di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabag Monitoring Bareskrim Polri dari tahun 2010 sampai tahun 2019,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan bahwa sampai dengan saat ini, dua tersangka lainnya,

BACA **TERSANGKA** HAL - 9



FOTO-FOTO: DZIKI OKTOMAULIYADI/BANTEN POS

AKSI BURUH TUNTUT KENAIKAN UMP
Perwakilan buruh melakukan orasi saat aksi di depan gerbang KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (5/11). Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 100 persen kebutuhan hidup layak (KHL).



IPM TERENDAH, PENGANGGURAN LEBAK MASIH TINGGI

LEBAK, BANPOS – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebak masih menjadi yang terendah di Provinsi Banten. Kondisi tersebut berjalan beriringan dengan persoalan ketenagakerjaan yang belum terselesaikan, menyusul masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di daerah tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kabupaten Lebak pada 2026 tercatat sebesar 70,20 poin. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang mencapai 69,24 poin, 2024 sebesar 68,33 poin, dan 2023 sebesar 67,69 poin.

BACA **IPM** HAL - 9

Vox Populi



Aceng Murtado
WARTAWAN BANTEN POS

Siap Menjadi Ayah

DOKTER memperkirakan anak yang sedang dikandung istriku akan lahir pada 10 November 2026. Namun, tanggal itu hanyalah perkiraan. Ia bisa datang lebih cepat atau sedikit lebih lambat. Yang pasti, sebentar lagi aku akan menyandang sebuah gelar baru,

BACA **VOX POPULI** HAL - 9

Dana CSR Harus Tepat Sasaran

SERANG, BANPOS – Sejumlah pihak mendesak pengelolaan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) di sejumlah daerah di Provinsi Banten dioptimalkan. Tujuannya, agar dana bantuan itu bisa dipergunakan dengan baik dan tepat sasaran.

Pihak-pihak yang menyuarakan optimalisasi dana CSR diantaranya adalah adalah Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon, Masduki. Andra Soni menyampaikannya di acara Musrenbang Non APBD Rembuk Ngabangun Banten 2026 bersama Forum Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan (TJSKBLP) yang di gelar di aula Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kamis (5/11). Di hari yang sama. Masduki

BACA **DANA** HAL - 9

MESKI TURUN 1,18 PERSEN, KEMISKINAN PANDEGLANG TERTINGGI DI BANTEN 03

HASBI JAYABAYA AJUKAN BANDING 04

ROBINSAR ANCAM TINDAK TEGAS PENCURI KABEL PJU 06

KERTAS DATA PRIBADI JADI PEMBUNGKUS GORENGAN 12

TERVERIFIKASI DEWAN PERS
BANPOS CHANNEL · WWW.BANPOS.CO · BANTENPOS@GMAIL.COM · BANTEN_POS · BANTEN POS
HARGA ECERAN RP 4.000

Warga Rancapinang Tolak Wilayah Sengketa Jadi Lokasi Latihan Militer

PANDEGLANG, BANPOS – Konflik agraria di Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, kembali memanas. Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rancapinang untuk Keadilan menolak rencana penggunaan wilayah sengketa sebagai lokasi latihan tempur Batalyon Infanteri TP 842/Badak Sakti pada 4–6 November 2026.

Koalisi menilai latihan militer tidak semestinya digelar sebelum sengketa hak atas tanah masyarakat diselesaikan. Mereka mendesak pihak militer membatalkan kegiatan tersebut dan meminta pemerintah terlebih dahulu menuntaskan konflik agraria yang disebut telah berlangsung sejak 1996.

Perwakilan Koalisi Rancapinang, Abdul Rohim Marbun, mempertanyakan rencana penggunaan lahan yang masih disengketakan untuk kegiatan militer. Menurutnya, masyarakat hingga kini masih memperjuangkan hak atas tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. "Bagaimana mungkin tanah yang masih dalam sengketa, yang masyarakatnya sedang memperjuangkan hak, justru akan digunakan kembali untuk aktivitas militer. Seharusnya persoalan ini diselesaikan terlebih dahulu, bukan malah menambah aktivitas di atas tanah yang masih dipersoalkan warga," ujarnya kepada BANPOS, Kamis (5/11).

Rencana penggunaan wilayah tersebut diketahui melalui surat Brigade Infanteri TP 87/Salakanagara, Yonif TP 842/Badak Sakti Nomor B/341/XI/2026 tertanggal 2 November 2026 tentang Permohonan Perizinan Daerah Latihan. Dalam surat itu, Yonif TP 842/Badak Sakti merencanakan Latihan Teknis Tingkat Unit Blok Mukim di Desa Rancapinang dengan menggunakan peluru hampa.

Koalisi menyebut lokasi latihan merupakan bagian dari objek konflik agraria antara masyarakat dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Bagi warga, lahan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan, melainkan ruang hidup yang menopang kegiatan pertanian dan penghasilan keluarga.

Menurut Abdul Rohim, konflik bermula pada 1996 ketika kegiatan latihan militer diduga menyebabkan kerusakan lahan pertanian warga. Persoalan kemudian berkembang menjadi sengketa pelepasan hak atas tanah. Koalisi menduga uang ganti rugi kerusakan tanaman akibat latihan militer dimanipulasi menjadi dasar penerbitan dokumen pelepasan hak tanpa transparansi dan persetujuan masyarakat.

Persoalan semakin rumit setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 1 Tahun 2012 atas nama Kemhan dengan luas sekitar 364 hektare. Koalisi mempersoalkan proses penerbitan sertifikat tersebut karena menilai tidak didahului pengukuran terbuka dan sosialisasi kepada masyarakat yang selama ini menguasai serta mengelola tanah secara turun-temurun.

Mereka juga mempertanyakan dasar hubungan hukum antara Kemhan dan PT Mandiri Nusa Graha Perkasa (MGP) dalam mekanisme tukar guling atau ruislag. Karena itu, koalisi meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang dan Kementerian ATR/BPN membuka dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tersebut. "Kami mempertanyakan bagaimana proses penerbitan sertifikat seluas 364 hektare itu dilakukan. Masyarakat yang selama ini menguasai dan mengelola tanah tidak mendapatkan penjelasan yang transparan. Karena itu, kami meminta BPN membuka seluruh dokumen dan menelusuri asal-usul perolehan tanah tersebut," kata Abdul Rohim.

Konflik kembali meningkat pada 2025 ketika pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) dilakukan di wilayah tersebut. Koalisi menyebut sejumlah lahan produktif warga, termasuk sawah dan kebun kelapa, melinjo, serta akasia, diratakan menggunakan alat berat.

Masyarakat kemudian menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang. Namun, pada 6 Agustus 2026, majelis hakim menyatakan gugatan warga tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya sengketa kepemilikan keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Koalisi menegaskan, putusan NO tidak dapat dimaknai sebagai pengesahan atas SHP Nomor 1 Tahun 2012 milik Kemhan. Menurut mereka, majelis hakim belum memeriksa pokok perkara mengenai keabsahan objek sengketa. "Putusan NO itu bukan berarti pengadilan menyatakan tanah tersebut sah menjadi milik Kementerian Pertahanan. Pokok persoalan kepemilikannya belum diperiksa dan diputus. Jadi, tidak boleh kemudian putusan itu ditafsirkan sebagai legitimasi untuk melakukan aktivitas di atas tanah yang masih dipersoalkan masyarakat," tegasnya.(MYU/PAY)

RUANG PUBLIK

Lojor Teu Meunang Dipotong

Ketika Kebudayaan Mengajarkan Manusia untuk Tahu Batas

OLEH:

Ocit Abdurrosyid Siddiq
Penggiat Budaya Sunda Banten



ADA sesuatu yang menarik dari cara masyarakat Baduy memandang kehidupan. Di tengah dunia yang semakin sibuk mengubah segala sesuatu, mereka menyimpan sejumlah pikukuh atau ketentuan adat yang mengajarkan manusia untuk tidak sembarangan memperlakukan alam. Salah satu ungkapan yang kerap dikaitkan dengan pandangan hidup tersebut berbunyi, "Lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung". Ungkapan lainnya, "Gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak". Keduanya sederhana, tetapi menyimpan perenungan mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan peradaban.

Secara harfiah, ungkapan pertama berarti panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Sementara ungkapan kedua berarti gunung jangan dihancurkan dan lembah jangan dirusak. Sepintas, keduanya seperti larangan yang mengatur tindakan manusia terhadap lingkungan. Namun, saya melihat sesuatu yang lebih mendasar, yakni kesadaran tentang batas. Tidak semua yang bisa diubah harus diubah, tidak semua yang bisa dikuasai harus dikuasai, dan tidak semua yang tersedia di alam harus dimanfaatkan.

Dari sudut pandang filsafat kebudayaan, kebudayaan bukan sekadar kumpulan benda, upacara, bahasa, dan kesenian yang diwariskan antargenerasi. Kebudayaan juga merupakan sistem nilai yang membentuk cara manusia memahami keberadaannya, menentukan sikap, dan mengambil keputusan. Ia menyediakan ukuran tentang apa yang pantas dilakukan, apa yang sebaiknya dihindari, serta apa yang harus dipertahankan. Dalam pengertian ini, pikukuh bukan sekadar kalimat tradisional, melainkan ekspresi pandangan hidup.

Ungkapan "lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung" dapat menjadi pintu masuk untuk memahami pandangan tersebut. Panjang dan pendek dapat dibaca sebagai gambaran tentang sesuatu yang telah memiliki ukuran dan keberadaannya sendiri. Manusia tidak boleh sembarangan memotong yang panjang atau menyambung yang pendek hanya karena merasa mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Ada sesuatu yang harus dihormati dalam keadaan sebagaimana adanya. Kehendak manusia tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran bagi segala sesuatu.

Tentu saja, ungkapan itu tidak harus dimaknai secara kaku seolah-olah semua perubahan dilarang. Kehidupan selalu bergerak dan kebudayaan pun tidak pernah sepenuhnya berhenti. Yang perlu diperhatikan adalah dasar dan tujuan perubahan. Apakah perubahan dilakukan karena diperlukan untuk menjaga kehidupan, atau sekadar karena manusia ingin menguasai sesuatu? Apakah hasilnya membawa kebaikan bersama, atau justru mengorbankan sesuatu yang nilainya jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh?

Di sinilah saya menemukan gagasan tentang filsafat batas. Batas bukan selalu berarti keterkungkungan, sebagaimana kebebasan bukan berarti ketiadaan batas. Sungai membutuhkan tepian agar air tidak kehilangan arah. Laut memiliki garis pantai sebagai ruang pertemuan antara daratan dan samudra. Bahkan kebebasan membutuhkan batas agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Mengenali batas bukan tanda kelemahan, melainkan kecerdasan dalam menjalani kehidupan.

Gagasan tersebut semakin terasa ketika kita membaca ungkapan gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak. Gunung dan lembah bukan sekadar bentang alam. Keduanya merupakan bagian dari sistem kehidupan yang saling berhubungan. Gunung menyimpan kawasan resapan air dan menjadi habitat berbagai jenis kehidupan, sementara lembah menjadi ruang bagi aliran air, tanah, tumbuhan, dan aktivitas kehidupan. Ketika keduanya dirusak, akibatnya tidak berhenti pada perubahan bentuk permukaan bumi, tetapi menjalar ke seluruh ekosistem.

Dalam pembacaan saya, ungkapan tersebut mengandung etika ekologis. Manusia tidak ditempatkan sebagai pemilik mutlak alam, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungannya. Alam bukan gudang bahan baku yang boleh dikuras selama masih menghasilkan keuntungan. Ia merupakan ruang hidup yang menopang keberadaan manusia dan makhluk lainnya. Memperlakukan alam secara bijaksana berarti memahami bahwa kepentingan manusia tidak dapat dipisahkan dari ekosistem tempat ia hidup.

Dalam pemikiran modern, alam sering ditempatkan sebagai objek yang diukur berdasarkan kegunaannya bagi manusia. Hutan dinilai dari kayunya, gunung dari kandungan mineralnya, sungai dari potensi ekonominya, dan laut dari hasil yang dapat dipanen. Cara pandang demikian memang menghasilkan kemajuan, tetapi juga berisiko membuat manusia lupa bahwa alam memiliki nilai yang tidak semata-mata ditentukan oleh kegunaannya. Ada fungsi ekologis yang tidak bisa digantikan oleh kalkulasi keuntungan ekonomi.

Di sinilah pikukuh Baduy menjadi bahan refleksi yang relevan. Ia menawarkan cara pandang bahwa manusia tidak harus selalu mengendalikan segala sesuatu. Ada kalanya manusia perlu menahan diri, membiarkan alam menjalankan prosesnya, dan menghormati keteraturan yang telah berlangsung jauh sebelum manusia hadir. Gunung tidak harus selalu dibelah, lembah tidak harus selalu ditimbun, dan tidak semua ruang harus diubah menjadi kawasan produktif. Ada ruang yang justru harus dipertahankan karena mempunyai fungsi bagi kehidupan yang lebih luas.

Dari pesisir Binuangeun, saya melihat hubungan manusia dan alam dalam ruang yang berbeda. Laut bukan hanya pemandangan indah ketika matahari terbit atau tenggelam. Ia merupakan sumber penghidupan, ruang kebudayaan, sekaligus lingkungan yang menentukan keberlangsungan masyarakat pesisir. Nelayan memahami bahwa laut tidak selalu dapat diperlakukan menurut kehendak manusia. Ada musim, gelombang, angin, dan arus yang harus diperhitungkan. Orang pergi melaut membawa harapan, tetapi juga kesadaran bahwa laut tidak pernah memberikan kepastian mutlak.

Pengalaman kehidupan pesisir itu membuat saya memahami bahwa kearifan ekologis bukan gagasan yang hanya hidup dalam buku atau ruang seminar. Ia dapat tumbuh dari pengalaman panjang manusia berhadapan dengan alam. Seorang nelayan mungkin tidak menjelaskan teori ekologi secara akademis, tetapi memahami kapan harus melaut, kapan harus menunggu, dan kapan sebaiknya tidak memaksakan diri. Barangkali dahulu saya terlalu sibuk mencari kalimat, sementara yang seharusnya saya perhatikan adalah kehidupan yang sedang berlangsung.

Kita tentu tidak harus menempatkan masyarakat adat sebagai kelompok manusia yang sepenuhnya bebas dari persoalan. Mereka juga menghadapi tantangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perubahan zaman. Masyarakat Baduy bukan benda museum yang harus dibekukan agar selalu tampak tradisional. Mereka adalah manusia yang menjalani kehidupan nyata dengan berbagai persoalan dan pilihan. Menghormati kebudayaan mereka berarti memahami mereka sebagai subjek kebudayaan yang mempunyai hak menentukan bagaimana nilai dan kehidupannya dipertahankan.

Karena itu, belajar dari pikukuh Baduy bukan berarti kita harus menyalin seluruh cara hidup mereka. Kita tidak perlu menyimpulkan bahwa semua pembangunan harus dihentikan atau seluruh teknologi harus ditinggalkan. Yang lebih penting adalah membawa nilai-nilai tersebut ke dalam percakapan tentang bagaimana pembangunan seharusnya dirancang dan dilaksanakan. Kemajuan tetap diperlukan, tetapi harus mempunyai ukuran etis. Pembangunan boleh mengubah ruang, tetapi tidak boleh menghilangkan syarat-syarat yang memungkinkan kehidupan terus berlangsung.

Dalam konteks Banten, pemikiran ini menarik ketika kita melihat keragaman wajah pembangunan dan kebudayaan. Di bagian selatan, kita masih dapat menemukan kehidupan masyarakat adat yang relatif kuat mempertahankan hubungan dengan lingkungan alamnya. Di bagian utara, kita menyaksikan pertumbuhan kawasan perkotaan modern dengan infrastruktur, pusat perdagangan, industri, dan perumahan. Keduanya memperlihatkan orientasi kehidupan yang berbeda, tetapi sama-sama menghadirkan tantangan tentang bagaimana manusia membangun tanpa kehilangan keseimbangan.

Saya tidak bermaksud mempertentangkan keduanya secara hitam putih. Kawasan perkotaan bukan musuh kebudayaan, sebagaimana masyarakat adat bukan representasi tunggal seluruh kebijaksanaan manusia. Kota membutuhkan pembangunan, lapangan kerja, pendidikan, transportasi, dan fasilitas publik. Masyarakat adat pun membutuhkan jaminan kehidupan yang layak dan perlindungan hak-haknya. Persoalannya bukan memilih antara Baduy atau kota modern, melainkan bagaimana keduanya dapat saling mengajarkan sesuatu tentang masa depan Banten.

Saya teringat ungkapan gawe kuta baluwarti bata kalawan kawis, yang pernah saya renungkan sebagai salah satu warisan pemikiran dari sejarah Kesultanan Banten. Ungkapan tersebut mengingatkan bahwa membangun kota dan benteng membutuhkan material, perencanaan, serta kemampuan manusia mengolah lingkungan. Namun, jika dibaca bersama pikukuh Baduy, muncul pertanyaan menarik: bagaimana membangun peradaban tanpa kehilangan kebijaksanaan dalam memperlakukan alam? Kemampuan membangun memang penting, tetapi kemampuan menjaga agar pembangunan tidak menghancurkan kehidupan jauh lebih penting.

Dalam filsafat kebudayaan, perubahan dan keberlanjutan bukan dua hal yang harus selalu dipertentangkan. Kebudayaan dapat berkembang tanpa kehilangan akar yang menopangnya. Tradisi dapat berdialog dengan modernitas tanpa menyerahkan seluruh nilai yang dimilikinya. Persoalannya adalah kemampuan manusia menentukan bagian mana yang dapat berubah dan bagian mana yang harus dijaga. Kesadaran batas bukan ajakan menghentikan sejarah, melainkan upaya agar perubahan tidak berjalan tanpa arah.

Saya kira, salah satu persoalan besar manusia modern adalah semakin sulit membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan mempunyai batas, sedangkan keinginan sering berkembang tanpa ujung. Setelah memiliki rumah, kita menginginkan rumah lebih besar. Setelah memiliki kendaraan, kita menginginkan yang lebih mahal. Setelah membangun satu kawasan, kita ingin membangun kawasan lainnya. Tidak ada yang salah dengan keinginan memperbaiki kehidupan. Namun, ketika keinginan tidak lagi mengenal batas, manusia kehilangan kemampuan untuk merasa cukup.

Mungkin di sinilah kebijaksanaan yang dapat kita pelajari dari pikukuh Baduy. Lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung bukan hanya pedoman memperlakukan sesuatu yang panjang dan pendek. Ia juga metafora tentang kehidupan yang tidak boleh terus-menerus dipaksa mengikuti kehendak manusia. Sementara gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak mengingatkan bahwa ada sesuatu yang harus dipertahankan bukan karena manusia tidak mampu mengubahnya, melainkan karena manusia memahami nilai keberadaannya.

Dari Kampung Binuangeun, ketika memandang laut yang terus bergerak tanpa kehilangan batas pantainya, saya membayangkan bahwa kehidupan sebenarnya telah menyediakan banyak pelajaran tentang keseimbangan. Laut tidak perlu menjadi daratan untuk membuktikan keberadaannya. Gunung tidak perlu menjadi kota untuk menunjukkan kegunaannya. Lembah tidak perlu dipenuhi bangunan agar dianggap bernilai. Masing-masing mempunyai tempat, fungsi, dan keterhubungan dalam keseluruhan kehidupan.

Saya kembali pada pertanyaan tentang ukuran kemajuan sebuah peradaban. Barangkali jawabannya tidak selalu ditemukan dalam gedung pencakar langit, jalan tol, atau angka pertumbuhan ekonomi. Bisa jadi, jawabannya justru tersembunyi dalam kesanggupan manusia menjaga sesuatu agar tetap utuh. Dalam kemampuan membangun tanpa merusak, mengembangkan tanpa menghilangkan, dan mengambil tanpa menghabiskan. Sebab, peradaban yang bijaksana bukanlah peradaban yang mampu mengubah segala sesuatu, melainkan peradaban yang tahu apa yang harus diubah dan apa yang harus dijaga.

Maka, mungkin yang perlu kita pelajari dari pikukuh Baduy bukan sekadar bagaimana menjaga gunung agar tidak dilebur atau lembah agar tidak dirusak. Lebih dari itu, kita perlu belajar menjaga manusia agar tidak kehilangan kebijaksanaannya sendiri. Sebab, kerusakan alam sering kali berawal dari kerusakan cara berpikir manusia. Ketika manusia menganggap dirinya sebagai pusat segala sesuatu, alam berubah menjadi objek yang dapat diperlakukan sesuka hati. Sebaliknya, ketika manusia menyadari dirinya sebagai bagian dari kehidupan, ia akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung. Gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak. Itulah cara sederhana sebuah kebudayaan mengingatkan manusia modern agar tidak terlalu mabuk oleh kemampuannya sendiri. Hidup bukan perlombaan untuk menguasai segala sesuatu. Ada saatnya kita perlu berhenti, menengok kembali, dan menyadari bahwa bumi ini bukan warisan yang boleh dihabiskan sesuka hati, melainkan titipan yang harus diteruskan kepada generasi sesudah kita. Wallahualam.*

BANTEN POS
Inspirasi dan Semangat Baru Banten

PEMBINA
Kiki Iswara Dharmayana

KOMISARIS UTAMA
Karim Paputungan

KOMISARIS
Maria Hanief

DIREKTUR
Rumi Nugraha dan M. Fahmi

PT BANTEN BERITA MERDEKA
Kantor: Ruko RDM, Jln. TB Suwandi/Lingkar Selatan
Blok D, No.3, Kota Serang, Banten
Telephon/Fax: (0254) 407 8285
No. Rek: Bank BJB - 0018 21501 2001
BCA -2454 061 704
(a/n PT. BANTEN BERITA MERDEKA)

Percetakan:
WAHANA SEMESTA INTERMEDIA
Jl. Jampang No. 99A, Bekasi. Telp: 0811 1071 633

DEWAN REDAKSI: Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, M. Fahmi, Saepudin, Chandra Magga | **PEMIMPIN PERUSAHAAN:** Saepudin | **PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB:** Chandra Magga | **REDAKTUR PELAKSANA:** Azmart Tusnedi | **REDAKTUR:** Ghuroofie Dzhillilhub, Stefano, Dedi Rustandi | **SEKRETARIS REDAKSI:** Cahya Andini | **REPORTER:** CH Widodo Haidar, Dede Suhada, Suganda, M. Wahyu, Taufiq Solehudin, Edwin Mahesa Pardede, Aceng Murtado | **PENGEMBANGAN BISNIS:** Sobar Rohmat | **IKLAN:** Zulfa Nadira (Manager), Dody Fitriadi | **FOTOGRAFER:** Dziki Oktomauliyadi | **PRA CETAK & PERWAJAHAN:** Supriadi (Manager), Fauzi Sandi, M Sy Ian Sangadji | **GRAFIS:** Ahmad Bukhori | **ACCOUNTING:** Ifroh Hardianti | **ADMINISTRASI KEUANGAN:** Azi Abdurohman | **ADMINISTRASI PAJAK:** Nadia Al Vani | **ADMINISTRASI:** Nia Aryanti | **PEMASARAN:** Eply Wahyudi

PERWAKILAN TANGERANG :
Komplek Green Garden Blok A-1, No. 2
Jalan MH Thamrin, Kota Tangerang, Banten

PERWAKILAN JAKARTA :
Gedung Graha Pena, Lantai 5
Jalan Kebayoran Lama No.12,
Jakarta Selatan
Telp/Fax: 021 - 53699624

PERCETAKAN :
PT. WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

TARIF IKLAN

TARIF IKLAN		**ADVERTORIAL**			
Hitam Putih (BW)	: **Rp. 47.000/mm kolom**	Hitam Putih (BW)	: **Rp. 47.000/mm kolom**	**IKLAN CILIK/BARIS**	
Warna (FC)	: **Rp. 69.000/mm kolom**	Warna (FC)	: **Rp. 69.000/mm kolom**	**Rp. 23.000/baris**	
Hitam Putih Hal. 1	: **Rp. 91.000/mm kolom**	**SOSIAL/KELUARGA**		- Minimal 3 baris	
Warna Hal. 1	: **Rp. 134.000/mm kolom**	Hitam Putih (BW)	: **Rp. 30.500/mm kolom**	- Maksimum 7 baris	
		Warna (FC)	: **Rp. 54.500/mm kolom**		

WARTAWAN BANTEN POS SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Meski Turun 1,18 Persen, Kemiskinan Pandeglang Tertinggi di Banten

PANDEGLANG, BANPOS – Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang pada 2026 tercatat sebesar 8,02 persen atau setara dengan 99.420 jiwa. Meski mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 9,18 persen, angka kemiskinan Pandeglang masih menjadi yang tertinggi di antara delapan kabupaten dan kota di Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2026, penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat. Namun, jumlah penduduk miskin yang masih mendekati 100 ribu jiwa menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dalam mempercepat program pengentasan kemiskinan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang, Achmad Widijanto, mengatakan, tren penurunan kemiskinan berlangsung secara bertahap sejak pandemi Covid-19. Pada 2026, garis kemiskinan di Pandeglang tercatat sebesar Rp577.855 per kapita per bulan. "Jumlah penduduk miskin Pandeglang turun menjadi 8,02 persen atau menyisakan sekitar 99.420 jiwa pada tahun 2026," kata Achmad kepada wartawan, Kamis (5/11).

Meski demikian, capaian tersebut belum mengubah posisi Pandeglang sebagai daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi di Banten. Kabupaten Lebak, yang menjadi wilayah terdekat, mencatat angka kemiskinan sebesar 7,50 persen, sedangkan kabupaten dan kota lainnya berada di bawah angka tersebut.

Achmad menjelaskan, selain persentase penduduk miskin, BPS juga mencatat perbaikan pada indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Pandeglang turun menjadi 0,78, sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) berada pada angka 0,18. Kedua indikator tersebut, terangnya, menggambarkan kondisi pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. "Garis kemiskinan tahun 2026 tercatat sebesar Rp577.855 per kapita per bulan yang mengalami kenaikan akibat faktor inflasi harga," ujarnya.

Menurut Achmad, penetapan garis kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan setara 2.100 kilokalori per kapita per hari serta kebutuhan nonmakanan. Dengan demikian, perubahan harga kebutuhan pokok turut memengaruhi besaran garis kemiskinan. Ia berharap, data statistik tersebut dapat menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan program penanggulangan kemiskinan. Intervensi perlu diarahkan kepada kelompok masyarakat rentan agar penurunan angka kemiskinan dapat berlangsung secara berkelanjutan. "Data statistik ini diharapkan menjadi acuan strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang program intervensi pengentasan kemiskinan," ungkapnya.(DHE/PAY)

KOTA BADAK

DEDE SUHADA/BANTEN POS



Dua dalang cilik asal Pandeglang, saat menerima penghargaan.

Dalang Cilik Pandeglang Juara Festival Nasional

DUA pelajar asal Kabupaten Pandeglang mengharumkan nama Provinsi Banten dalam Festival Dalang Anak Nasional (FDAN) ke-19 Tahun 2026. Dalam ajang yang digelar Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) Pusat di Padepokan Pewayangan Kautaman, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada 2-4 November 2026 tersebut, satu pelajar berhasil meraih juara pertama dan satu lainnya menempati posisi keempat.

Prestasi tertinggi diraih Rizki Wahyu Rohman, siswa SMPN 3 Pandeglang, yang keluar sebagai Juara 1 Kelompok B kategori usia 12-15 tahun melalui lakon Jaya Perbangsa. Sementara itu, Altan Muttaqi Sasmita, siswa SDN Pandeglang 6, meraih Juara 4 Kelompok A kategori usia 8-11 tahun.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pandeglang, Sutoto, mengatakan, keberhasilan kedua pelajar tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Pandeglang. Menurutnya, prestasi itu menunjukkan potensi seni dan budaya tradisional masih tumbuh di kalangan generasi muda. "Ibu Bupati sangat mengapresiasi potensi dalang cilik ini sebagai talenta luar biasa. Beliau menegaskan bahwa bakat-bakat seperti ini harus difasilitasi dan disalurkan melalui pembinaan minat dan bakat pelajar secara berkesinambungan," kata Sutoto kepada wartawan, Kamis (5/11).

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Pandeglang melalui Dindikpora berencana memperkuat pembinaan seni pedalangan di lingkungan sekolah. Salah satu program yang tengah dirancang adalah Dalang Cilik Masuk Sekolah untuk memperkenalkan sekaligus mengembangkan seni pewayangan di kalangan pelajar. "Ke depan, kami akan mengoptimalkan pembinaan ini melalui rencana program khusus, yaitu Dalang Cilik Masuk Sekolah," ungkapnya.(DHE/PAY)

Retribusi Wisata Cikoromoy Mulai Terapkan Pembayaran QRIS



Pimpinan Bank Banten KC Pandeglang, Trio Adit Pamungkas bersama Kepala Disparbud Kabupaten Pandeglang, Budi Seuherdiman Januari saat peluncuran Qris Bank Banten.

PANDEGLANG, BANPOS – Pemungutan retribusi masuk objek wisata Cikoromoy, Kabupaten Pandeglang, mulai menerapkan sistem pembayaran non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Digitalisasi yang digagas Bank Banten Kantor Cabang Pandeglang bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pandeglang tersebut ditujukan untuk meningkatkan transparansi penerimaan retribusi sekaligus meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah.

Peluncuran sistem pembayaran digital itu ditandai dengan transaksi retribusi pertama menggunakan QRIS Bank Banten. Melalui sistem tersebut, wisatawan dapat membayar tiket masuk dengan memindai kode QR menggunakan berbagai aplikasi pembayaran digital, seperti mobile banking, GoPay, OVO, DANA, ShopeePay, maupun aplikasi perbankan lainnya.

Pimpinan Bank Banten KC Pandeglang, Trio Adit Pamungkas, mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bentuk dukungan bank pembangunan daerah terhadap transformasi digital pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang. Menurutnya, selama ini pemungutan retribusi yang dilakukan secara tunai memiliki sejumlah risiko, mulai dari selisih pencatatan hingga potensi kehilangan uang. Dengan sistem QRIS, setiap transaksi dapat tercatat secara digital dan dipantau secara real time. "Selama ini pemungutan retribusi masih tunai, rawan selisih, rawan kehilangan, dan sulit diawasi. Dengan QRIS, semua tercatat otomatis, real-time, dan langsung masuk ke rekening kas daerah. Ini bukan hanya soal pembayaran, tapi soal tata kelola yang bersih," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disparbud Kabupaten Pandeglang, Budi Seuherdiman Januari, mengatakan, Cikoromoy menjadi proyek percontohan penerapan pembayaran digital di sektor pariwisata. Jika pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, sistem serupa akan diperluas ke sejumlah destinasi wisata lainnya. "Cikoromoy kami jadikan percontohan. Kalau di sini berhasil, kami akan terapkan di Carita, Tanjung Lesung, dan semua objek wisata lainnya. Target kami, pariwisata Pandeglang menjadi pariwisata yang transparan dan modern," tuturnya.

Budi menjelaskan, penerapan QRIS diharapkan memudahkan pengawasan penerimaan retribusi karena seluruh transaksi tercatat secara elektronik. Pemerintah daerah juga dapat memperoleh data penerimaan dan jumlah kunjungan wisatawan sebagai bahan evaluasi pengelolaan destinasi. "Setiap rupiah retribusi yang dibayar wisatawan langsung tercatat secara digital dan masuk ke rekening resmi. Tidak ada lagi uang tunai yang mengendap di loket, tidak ada lagi potensi kebocoran dan selisih. Laporan pendapatan bisa dipantau kapan saja oleh dinas dan BPKD," jelasnya.

Selain memperbaiki pencatatan penerimaan, digitalisasi juga diharapkan memberikan kemudahan bagi wisatawan. Pengunjung tidak perlu menyiapkan uang tunai atau mencari uang pas untuk membayar tiket masuk. Di sisi pengelolaan, sistem pembayaran non-tunai dinilai dapat mengurangi risiko kehilangan uang maupun peredaran uang palsu di loket. Dengan demikian, petugas dapat lebih berkonsentrasi pada pelayanan dan kebersihan kawasan wisata.

Tidak hanya untuk pembayaran retribusi, Bank Banten juga memfasilitasi pelaku UMKM di kawasan Cikoromoy dengan layanan QRIS. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk transaksi pembelian makanan, minuman, dan produk oleh-oleh. Budi berharap, kemudahan transaksi digital dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM diharapkan memperluas akses pembayaran dan memudahkan pencatatan transaksi usaha. "Jadi, pengelola bisa fokus pada pelayanan dan kebersihan objek wisata," ucapnya.(DHE/PAY)

Pengelola Wisata Religi Gunung Tilu Dibekali Perizinan OSS

PANDEGLANG, BANPOS – Pengelola destinasi wisata religi Makom Gunung Tilu, Desa Kramat Jaya, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, mulai dibekali pemahaman mengenai legalitas usaha dan peningkatan kompetensi pelayanan wisata. Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan perizinan usaha berbasis sistem Online Single Submission (OSS) bagi 25 kuncen atau juru pelihara dan pemandu wisata, Kamis (5/11).

Pembinaan tersebut difasilitasi Resor Cibadak, Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah III, Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK). Selain memberikan pemahaman mengenai prosedur perizinan, kegiatan itu juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemandu dalam memberikan pelayanan serta menjaga keselamatan pengunjung.

Kepala Resor Cibadak, Diding, mendukung kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong pengelolaan destinasi wisata alam yang lebih tertib dan sesuai ketentuan. Melalui pendampingan ini, para pengelola diharapkan memahami kewajiban legalitas usaha dalam penyelenggaraan jasa wisata.

Dalam penyampaian materi, Muhiban dari BTNUK menjelaskan regulasi dan mekanisme pengurusan Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA) melalui sistem OSS. Pendampingan tersebut diharapkan memudahkan para pengelola dalam memenuhi persyaratan administrasi perizinan. "Melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan ini, kami berharap para kuncen Makom Gunung Tilu semakin memahami pentingnya legalitas usaha, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mampu memberikan pelayanan wisata yang aman, nyaman, dan profesional," katanya.

Selain materi perizinan, peserta juga mendapatkan simulasi penggunaan sistem OSS yang disampaikan Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Citeluk Sejahtera, Desa Mangku Alam, Kecamatan Cimanggu, Aldrin Firmansyah. Praktik tersebut diberikan agar para peserta memahami tahapan pengurusan izin secara daring.

Pembinaan juga menyentuh aspek peningkatan kompetensi pemandu wisata religi. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PSDP dan Ekraf) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pandeglang, Mia Maulani Rizki, memberikan materi mengenai keterampilan dan profesionalisme pemandu wisata.

Menurut Mia, kemampuan pemandu dalam memberikan informasi, berkomunikasi dengan pengunjung, serta memahami aspek keselamatan menjadi bagian penting dalam pengelolaan destinasi wisata. Hal tersebut juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kunjungan wisatawan dan mengurangi risiko kecelakaan di lokasi wisata. "Kegiatan ini penting dalam upaya meningkatkan kunjungan wisata dan menekan angka kecelakaan di destinasi wisata. Jika hal tersebut bisa terlaksana, tentu wisatawan akan merasa nyaman dan berkesan," katanya.

Makom Gunung Tilu merupakan salah satu destinasi wisata religi di Desa Kramat Jaya yang dikenal sebagai petilasan Adipati Ukur Raden Summadi Kara dari Kerajaan Sumedang Larang. Keberadaan kuncen atau juru pelihara memiliki peran penting dalam menjaga nilai sejarah dan tradisi sekaligus memberikan informasi kepada pengunjung.(DHE/PAY)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Labuan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 156 Labuan, Pandeglang - Banten akan melaksanakan penjualan di muka umum/lelang eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang terhadap jaminan yang atas nama **Ahmad Wamsito** sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai SHM No. 01551/Kadumerak seluas 207 M² Atas Nama **Ahmad Wamsito** yang terletak di Jalan KMD Lintas Timur, RT 3/RW 001, Desa Kadumerak, Kecamatan Kaslangtanjung, Kabupaten Pandeglang. **Harga limit** sebesar **Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah). Uang Jaminan** ditetapkan minimal 20% dari harga limit lelang atau 20% dari **Rp. 600.000.000,-** yaitu sebesar **Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).**
2. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang terdiri diatasnya sesuai SHGB No. 08660/Cigadung seluas 69 M² Atas Nama **Ahmad Wamsito** yang terletak di Perumahan Cleon Mitra Residence 2, Desa Cigadung, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. **Harga limit** sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Uang Jaminan** ditetapkan minimal 20% dari harga limit lelang atau 20% dari **Rp. 200.000.000,-** yaitu sebesar **Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).**

Syarat-syarat lelang :

1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara terbuka (open bidding) tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain https://lelang.go.id/. Tata cara mengikuti dapat dilihat di menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut
2. Calon peserta mendaftar dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dan mencetak serta menggunakan softcopy KTP dan memasukkan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri
3. Waktu Pelaksanaan :
   Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain di atas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan :
   Hari /Tanggal : Senin, 23 November 2026
   Waktu Penawaran : Sejak lelang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
   Batas Akhir Penawaran : 23 November 2026 Pukul 10.45 Waktu Server e-Auction (WIB)
   Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang
   Jalan Raya Serang-Cilegon KM 3 Kota Serang
   Alamat Domain : https://lelang.go.id/
   Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
   Peserta lelang dianjurkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut.
4. Uang Jaminan Lelang :
   a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan :
      - Jumlah/nominal yang disebutkan harus sama persis dengan uang jaminan yang ditunjukkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disebutkan sebuah dan sekaligus
      - Seluruh uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL Serang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penutupan penawaran lelang
   b. Uang jaminan lelang disebutkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid
5. Penawaran lelang dan tawaran lelang sedikit-sedikit sama dengan atau lebih dari dapat dibatalkan berbuat lain
6. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang 2% secara tunai atau cek/giro paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
7. Pengosongan BPHTB atas pembelian tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal dimana objek lelang berada
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Labuan No. Telp : (0253) 801034, 801214, 802893, 851767 - atau KPKNL Serang No. Telp (0254) 219361

Labuan, 06 November 2026
Tbl
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Branch Office Labuan

KPKNL Serang — BANK BRI

IKLAN LARIS BANTEN POS
Info Iklan:
- 081334404392
- 087808831153

KEHILANGAN

TELAH HILANG SHM 01506 AN. DJASAM NZ, LUAS 166 M2, TERLETAK DI KELURAHAN SELAPAJANG JAYA, KEC. NEGLASARI, KOTA TANGERANG, PELAPOR JAMAL PASHA.

TELAH HILANG AJB No. 94/2014, Tgl. 3 Feb 2014, a.n Hajjah Tuti Mulyati, Jl. Winong RT. 002/06, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Luas 21 m2 dan AJB No. 95/2014, Tgl. 3 Feb 2014, a.n Hajjah Tuti Mulyati, Jl. Winong RT. 002/06, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Luas 50 m2

TELAH HILANG AJB No. 282/2009, Tgl. 3 April 2009, A.N Hajjah Tuti Mulyati, Jl. Winong RT. 002/06, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Luas 37 M2 Dan Ajb No. 378/2011, Tgl. 28 Juli 2011, A.N Hajjah Tuti Mulyati, Jl. Winong Rt. 002/06, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Luas 70 M2

Telah Hilang map biru yang berisi SHM a/n Enny Ambarita jl.Andalan raya 7 Berngam binjai,surat ukur No. 185/berngam/2002,luas 135 M2,AJB a/n Enny Ambarita dan Bpkb motor a/n Enny Ambarita

Telah Kehilangan 1 Ekslempar Surat Berharga BPKB Sepeda Motor - BPKB R2 NOPOL: A-6101-DZ, Tahun Pembuatan: 2023/2024, Warna: Merah Hitam, NOKA: MH1JM8124124PK317277, NOSIN: JM81E2317432, WARNA TNKB: PUTIH ATAS NAMA: PELAPOR, Diketahui Hilang pada Tanggal 13 Oktober 2026 Pukul 23.00WIB Di Jl. Perumahan Waringinkurung, Waringinkurung, Kabupaten Serang Banten

Kehilangan 1 (satu) buku BPKB kendaraan R4 merk Toyota Type Camry 3,5 Q AT, Plat Nomor B 25 JOY. Nomor rangka : MR053KK40A9002293 Nomor Mesin : 2GR0750023 atas nama TAN IE CIAW nomor BPKB : H05465816

Kehilangan di kantor PT. BAJA PERKASA SENTOSA yang beralamat di Jl. Lanud Gorda KM 1, No. 9, Cikande, Kampung Maja, Kec. Kibin, Kabupaten Serang, Banten 42185

Atas nama pemilik BPKB TAN IE CIAW yang beralamat di jln pluit sakti 4/34 RT.005 RW.007 Kel. Pluit kec. Penjaringan Kota. Jakarta utara Prov. DKI Jakarta HP 081399356786

MAKANAN

Jual/menerima pesanan Bubur Ayam Cianjur dan Lontong Sayur. **alamat:** Lampu merah Perumahan Graha Asri, Ciracas, Kota Serang - Banten Hub: Jejen 0878 7346 4053

WEBSITE www.banpos.co | EMAIL iklanbantenpos@gmail.com | TWITTER @bantenpos | INSTAGRAM banten_pos | FACEBOOK facebookbantenpos | YOUTUBE Banpos Channel

HASBI JAYABAYA AJUKAN BANDING

Terkait Putusan PTUN yang Batalkan Pemberhentian Kades Kerta

LEBAK, BANPOS - Bupati Lebak Hasbi Jayabaya menempuh upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang yang mengabulkan gugatan Ricki Zaenal Abidin terkait pemberhentiannya dari jabatan Kepala Desa (Kades) Kerta, Kecamatan Banjarsari.

Asisten Daerah (Asda) Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Lebak, Alkadri, membenarkan langkah hukum tersebut. Menurut dia, Hasbi Jayabaya menggunakan upaya hukum yang tersedia sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Betul, dapat disampaikan bahwa kami ingin menggunakan upaya hukum yang diatur dalam perundang-undangan," kata Alkadri, Kamis (5/11).

Alkadri belum membeberkan alasan dan argumentasi hukum yang mendasari keputusan Pemkab Lebak mengajukan banding atas putusan PTUN Serang pada 28 Oktober 2026.

Dia mengatakan, tim kuasa hukum Pemkab Lebak masih menyusun memori banding. Penjelasan lebih terperinci mengenai dasar pengajuan banding akan disampaikan setelah dokumen tersebut selesai disusun dan diserahkan.

"Tim kuasa hukum Pemkab Lebak sedang menyusun memori banding. Alasan detailnya akan kami sampaikan setelah memori banding siap dan diserahkan," ujarnya.

Meski demikian, Alkadri menegaskan, keputusan Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya memberhentikan Ricki dari jabatan Kades Kerta memiliki dasar yang kuat dan telah sesuai dengan aturan.

"Iya, tentunya ada alasan yang kuat (memberhentikan Ricki)," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Banten, Rafik Rahmat Taufik, menyarankan Pemkab Lebak tidak perlu melanjutkan perkara tersebut ke tingkat banding. Menurut dia, kedua belah pihak sebaiknya mengutamakan pendekatan persuasif untuk menyelesaikan persoalan dan menjaga kondusivitas di Desa Kerta.

Rafik menilai, komunikasi antara pemerintah daerah dan Ricki perlu dibangun agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Dia juga mendorong adanya pembinaan terhadap kepala desa serta evaluasi terhadap penyebab polemik yang terjadi.

"Tidak harus lah sampai banding, tapi gunakan pendekatan persuasif. Berikan pembinaan dan tekankan juga kepada Ricki agar segera kondisi desa kondusif. Termasuk Ricki pun harus introspeksi dan evaluasi diri karena polemik yang terjadi kan pasti ada sebab musababnya," jelas Rafik.

Menurut dia, berlanjutnya sengketa ke pengadilan tingkat berikutnya berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah desa.

"Tadi saya bilang ini bukan pertandingan antara pemerintah daerah, apalagi ini dengan kepala desa, jadi lucu," katanya.

Untuk diketahui, majelis hakim PTUN Serang dalam putusan pada 28 Oktober 2026 mengabulkan seluruh gugatan Ricki Zaenal Abidin dalam perkara Nomor 25/G/2026/PTUN.SRG.

Dalam putusannya, pengadilan menyatakan batal Keputusan Bupati Lebak Nomor 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tertanggal 13 April 2026 tentang pemberhentian Ricki Zaenal Abidin dari jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari.

Putusan tersebut juga mewajibkan Bupati Lebak mencabut keputusan pemberhentian itu serta merehabilitasi dan memulihkan hak serta martabat Ricki dalam kedudukannya sebagai Kades Kerta.(TQS/RUS)

MULTATULI

WMK Sebut Kebakaran Baksel Cukup Tinggi

Selama Kurun Waktu Lima Bulan

KEBAKARAN lahan di wilayah Lebak Selatan (Baksel) yang masuk dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Malingping dilaporkan cukup tinggi selama lima bulan terakhir.

Tercatat sebanyak 30 titik kebakaran terjadi di sejumlah wilayah, terutama di lahan perkebunan dan lahan kosong. Sebagian besar kebakaran diduga disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error.

Petugas Pemadam Kebakaran WMK Malingping, Saepudin mengatakan, bahwa selama 5 bulan terakhir, kebakaran lahan mendominasi kejadian kebakaran di wilayah kerjanya, khususnya di area perkebunan dan lahan kosong.

"Dari yang sudah kami tangani sejak lima bulan lalu hingga saat ini, ada 32 titik kebakaran di wilayah Lebak Selatan yang ditangani WMK Malingping," katanya, Kamis (5/11).

Menurut Saepudin, dari total 30 titik kebakaran tersebut, sebanyak 8 titik terjadi di wilayah Kecamatan Malingping. Sementara itu, di Kecamatan Cijaku tercatat 5 titik kebakaran, Kecamatan Banjarsari 5 titik, Kecamatan Cihara 7 titik, Kecamatan Panggarangan satu 1 titik dan Kecamatan Wanasalam 6 titik.

"Seluruh titik kebakaran tersebut berhasil ditangani petugas pemadam kebakaran. Mudah-mudahan musim penghujan segera datang, agar bahaya kebakaran sedikit," terang Saepudin.

Dijelaskannya, penyebab kebakaran secara umum adalah kelalaian manusia, seperti membakar sampah sembarangan dan membuang puntung rokok yang masih menyala. Selain itu, terdapat pula kebakaran yang diduga sengaja dilakukan dan berpotensi merambat ke area lahan lainnya.

"Kebakaran ini secara umum disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error, seperti membakar sampah sembarangan dan membuang puntung rokok. Ada juga yang dibakar dengan sengaja sehingga api dapat meluas ke lahan lainnya," ujarnya.(WDO/RUS)

Pemkab Lebak Siapkan Anggaran Rp200 Miliar untuk Infrastruktur pada 2027



Plt Kepala DPUPR Kabupaten Lebak, Dade Yan Apriyandi, mengatakan Pemkab Lebak telah mengalokasikan anggaran pada APBD 2027 sebesar Rp200 miliar untuk pembangunan infrastruktur, termasuk jalan poros desa

LEBAK, BANPOS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak berencana meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan pada 2027. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak memperkirakan anggaran tahun depan mencapai Rp200 miliar untuk membiayai berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan jalan poros desa dan jalan kabupaten.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPUPR Kabupaten Lebak, Dade Yan Apriyandi, mengatakan pembangunan jalan poros desa pada 2027 direncanakan menjangkau lebih banyak titik dengan panjang penanganan jalan yang lebih besar dibandingkan tahun ini.

"Untuk tahun 2027 itu jalan poros desa lebih banyak titik lokasinya, kemudian lebih panjang juga hasilnya, termasuk jalan kabupaten juga," ujar Dade, Kamis (5/11).

Dia menjelaskan, anggaran DPUPR pada 2027 masih berupa rencana. Dana sekitar Rp200 miliar tersebut akan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan dinas, mulai dari gaji pegawai hingga pembangunan infrastruktur.

"Sementara 2027 rencananya Rp200 miliar, itu untuk semuanya khusus DPUPR," katanya.

Sementara itu, pada tahun anggaran 2026, Pemkab Lebak mengalokasikan pembangunan jalan poros desa di 42 titik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39 titik telah selesai dikerjakan, sedangkan tiga titik lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Dade mengatakan, tiga pekerjaan yang belum rampung tersebut merupakan kegiatan yang proses lelangnya berlangsung paling akhir.

"Untuk kegiatan jalan poros desa anggaran murni tahun 2026 itu semuanya ada 42 titik. Tiga titik belum selesai karena lelangnya terakhir. Kalau yang lainnya alhamdulillah sudah selesai," ujarnya.

Menurut Dade, pembangunan jalan poros desa dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Lebak. Sebaran pekerjaan tersebut mencakup hampir seluruh dari 28 kecamatan.

"Hampir merata dari 28 kecamatan itu," katanya.

Dade menjelaskan, pembangunan jalan terbagi berdasarkan kewenangan pemerintah desa, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Jalan desa pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah desa, tetapi keterbatasan anggaran membuat pemerintah desa belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur secara mandiri.

"Jalan desa itu sebetulnya kewenangan pemerintah desa, tapi bagaimana pun juga mereka tidak punya anggaran," ungkapnya.

Meski demikian, Pemkab Lebak tetap memberikan perhatian terhadap pembangunan jalan desa melalui anggaran daerah. Menurut Dade, kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah kabupaten terhadap kebutuhan infrastruktur yang digunakan masyarakat.

"Bagaimanapun juga desa yang ada di Lebak penggunaannya untuk warga Lebak. Alhamdulillah atas kepedulian Pak Bupati memprioritaskan jalan desa tersebut," jelasnya.

Dade juga memastikan, pekerjaan jalan poros desa yang telah rampung berada dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan masyarakat.(TQS/RUS)







Tanaman padi usia tujuh hari setelah tanam di Blok Tambakbaya Kabupaten Lebak, karena memasuki musim penghujan. ANTARA/Mansur

Petani Mulai Lakukan Tanam Padi Serentak

LEBAK, BANPOS - Petani di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lebak, mulai melakukan penanaman padi serentak, sehubungan beberapa hari terakhir memasuki musim penghujan.

"Kami bersama petani di sini sudah melakukan tanam padi usia tanam rata-rata tujuh setengah hari tanam," kata Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Blok Tambakbaya Kabupaten Lebak, Ruhiana di Lebak, Kamis (5/11).

Pelaksanaan penanaman padi serentak itu di lahan seluas 250 hektare karena memasuki musim penghujan.

Dimana lahan sawah di Blok Tambakbaya Kabupaten Lebak, masuk kategori sawah tadah hujan, karena tidak terdapat jaringan irigasi.

Namun, penanaman bisa dilakukan dalam setahun tiga kali musim panen.

"Kita jika musim kemarau bisa tanam dengan mengoptimalkan pompa dan menyedot air permukaan Sungai Ciujung," kata Ruhiana.

Rohman,petani Warunggunung Kabupaten Lebak mengaku dirinya bersama puluhan petani di Blok Cemplang seluas 50 hektare sudah tiga hari melakukan penanaman padi.

Mereka petani menanam padi, karena curah hujan cukup tinggi, sehingga dapat menumbuhkan kesuburan tanaman.

"Kami melakukan tanam padi hanya musim hujan saja, karena sawah tadah hujan tak memiliki irigasi itu," katanya menjelaskan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar mengatakan pihaknya menginstruksikan kepada petugas penyuluh lapang (PPL) agar memaksimalkan penanaman padi guna mendukung kedaulatan pangan dan swasembada pangan.

Sebab, wilayah Kabupaten Lebak sebagai sentra lumbung pangan di Provinsi Banten.

Saat ini,kata dia, diberbagai kecamatan di Lebak telah melakukan gerakan penanaman padi, terlebih curah hujan tinggi.

"Kami optimistis target produksi gabah kering 1.000 ton atau 700 ton setara beras bisa direalisasikan tahun 2026," kata Rahmat.(ANT/RUS)



Pemkab Serang Gencarkan Sektor Pertanian dan Kesehatan Ternak

Dukung Swasembada Pangan dan Pengendalian Inflasi

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Serang terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menekan angka inflasi. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui serangkaian program strategis di bidang pertanian dan peternakan yang menyasar komoditas hortikultura hingga pangan utama.

Pemkab Serang menggelar Panen Raya Bawang Merah yang merupakan bagian dari Program Ratu Tani Bahagia (Kolaborasi Bersatu Pertanian) di Kampung Desa Pegandikan, Kecamatan Lebak Wangi.

Pesan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah yang disampaikan melalui Asda II Febriyanto, menyampaikan apresiasi mendalam atas semangat para petani di Lebak Wangi yang konsisten menggalakkan budidaya hortikultura, khususnya bawang merah dan cabai.

Ia menambahkan, Pemkab Serang juga mendorong pembentukan Kampung Hortikultura di berbagai wilayah. Hal ini agar tujuan swasembada pangan dapat tercapai lebih maksimal.

"Bawang merah merupakan kebutuhan pokok yang sangat vital bagi masyarakat setiap harinya. Bantuan benih yang dipanen hari ini bersumber dari APBD Kabupaten Serang melalui DKPP. Dana bantuan ini tidak perlu dikembalikan ke OPD, melainkan terus digulirkan kepada masyarakat secara berkesinambungan agar kredibilitas petani dan swasembada pangan terus terjaga," terang Febriyanto.

Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Serang Suhardjo menekankan bahwa pengembangan bawang merah menjadi fokus utama karena komoditas ini merupakan salah satu dari 11 bahan pokok pemicu inflasi.

Dengan konsumsi bawang merah masyarakat Serang yang mencapai 3 kg per orang per







minggu (sekitar 400 ton per bulan atau 15 ton per hari), angka produksi tahun 2025 yang baru mencapai 74 ton dinilai masih belum mencukupi kebutuhan daerah.

"Tahun ini, melalui APBD Kabupaten Serang, kita kembangkan lahan seluas 16,5 hektare dengan target produksi naik menjadi 80 ton. Selain itu, untuk alokasi September mendatang, kita sudah mengajukan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) seluas 52,2 hektare di 7 kecamatan ke Kementan. Harapan kita, pola tanam dan panen dapat diatur bergantian setiap bulan agar suplai selalu terjaga," jelas Suhardjo.

Geliat sektor pertanian Kabupaten Serang tidak berhenti pada komoditas hortikultura. Dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-500 Kabupaten Serang, Pemkab Serang melalui DKPP juga menggelar Gerakan Tanam Padi Serempak seluas 500 hektare di 29 kecamatan.

Penanaman padi yang berlangsung sepanjang September hingga Oktober ini menerapkan teknologi Pertanian Modern–Advanced Agricultural System (PM-AAS). Pola ini berbeda dari penanaman konvensional karena menggunakan metode Tabela (tebar benih langsung) serta penyesuaian dosis pupuk dan dolomit untuk pH tanah.

"Melalui pola PM-AAS, penggunaan benih ditingkatkan dari 20 kg menjadi 80 kg per hektare, pupuk Urea dari 100 kg menjadi 200 kg per hektare, serta penyesuaian NPK. Dengan metode ini, kita menargetkan hasil panen meningkat dua kali lipat, dari biasanya 5–6 ton menjadi 10–12 ton per hektare," ungkap Suhardjo.

Tak hanya sektor tanaman pangan, kesehatan hewan ternak turut menjadi perhatian dalam peringatan momentum bersejarah tersebut. DKPP menggelar aksi 500 vaksinasi hewan ternak (sapi dan kerbau) serta pemberian vitamin, swab, dan pengambilan sampel darah untuk mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Suhardjo juga menuturkan, berbagai langkah konkret ini diharapkan mampu mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.

"Vaksinasi dilaksanakan bertahap sepanjang September-Oktober di berbagai titik peternakan, seperti Kecamatan Padarincang, Cinangka, Cikande, Lebakwangi, Waringinkurung, dan wilayah lainnya. Tujuannya agar para peternak merasa tenang dan kesejahteraan mereka terus meningkat," tutur Suhardjo. (ADV)



BANPOS CHANNEL WWW.BANPOS.CO BANTENPOS@GMAIL.COM BANTEN_POS BANTEN POS

Robinsar Ancam Tindak Tegas Pencuri Kabel PJU

CILEGON, BANPOS - Walikota Cilegon Robinsar menegaskan akan menindak tegas pelaku pencurian kabel penerangan jalan umum (PJU) di wilayahnya. Selain menyebabkan kerugian terhadap aset pemerintah, aksi tersebut dinilai mengancam keselamatan pengguna jalan karena dapat membuat ruas jalan gelap dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Robinsar mengatakan, pencurian kabel PJU bukan persoalan sepele meskipun panjang kabel yang diambil hanya beberapa meter. Pasalnya, kerusakan jaringan penerangan akibat pencurian dapat menyebabkan lampu jalan tidak berfungsi dan membahayakan masyarakat. "Intinya kita beri efek jera, karena ini bukan bicara kabel yang hilang saja. Tapi ini bicara keselamatan masyarakat karena ketika jalannya gelap, lampunya ada kabelnya dicolong orang jadi gelap, ada kecelakaan meninggal dunia," kata Robinsar.

Ia memastikan, Pemkot Cilegon akan terus berupaya mengungkap pelaku pencurian kabel PJU. Penindakan tidak hanya dilakukan untuk menyelesaikan kasus yang sudah terjadi, tetapi juga mencegah aksi serupa terulang di sejumlah ruas jalan. "Agar maling kabel itu, walaupun nyolong paling berapa meter kita harus pikirkan dampak ke depannya. Kita akan perangi, kita tidak akan selesai di sini, kita akan cari itu maling-maling kabel supaya tidak ada lagi maling kabel di Cilegon," tegasnya.

Di sisi lain, Pemkot Cilegon telah menerapkan teknologi smart LED untuk memantau kondisi lampu penerangan jalan. Sistem tersebut memberikan indikator warna hijau ketika lampu berfungsi dan merah ketika lampu tidak menyala. Namun, teknologi tersebut belum mampu mengidentifikasi penyebab lampu padam, termasuk mendeteksi secara khusus jika terjadi pencurian kabel. Sistem hanya memberikan informasi mengenai kondisi operasional lampu. "Sekarang smart LED ketika lampu nyala warna hijau, ketika mati warna merah, untuk deteksi maling kita enggak tahu," ungkap Robinsar.

Sebelumnya, kasus pencurian kabel penerangan jalan umum (PJU) di Kota Cilegon kembali terjadi. Dua orang yang diduga terlibat pencurian kabel di kawasan Flyover Cibeber diamankan setelah aksinya diketahui Walikota Cilegon Robinsar di kawasan Taman Geger, Selasa (3/11) malam.

Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, Faturohman, membenarkan adanya pengamanan dua orang yang diduga terlibat dalam pencurian kabel PJU. Keduanya masing-masing diduga berperan sebagai pengambil kabel dan penadah. Faturohman mengaku tidak mengetahui secara langsung proses penangkapan tersebut. Informasi awal diterimanya dari salah seorang ajudan Walikota Cilegon pada Selasa malam. "Secara detail saya kurang tahu. Namun, malam itu saya mendapat telepon dari ajudan Pak Wali bahwa ada satu orang yang diduga mencuri kabel tertangkap di Taman Geger Cilegon," kata Faturohman, Rabu (4/11).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, menilai penangkapan tersebut harus menjadi momentum bagi Pemkot Cilegon untuk memperkuat sistem pengamanan fasilitas publik. Ia mengingatkan, DPRD sebelumnya telah mengusulkan penerapan smart early warning agar pencurian aset daerah, termasuk kabel dan lampu PJU, dapat terdeteksi sejak dini.

Menurut Rizki, sistem tersebut tidak cukup hanya mengandalkan kamera pengawas. Teknologi yang diterapkan harus mampu mendeteksi gangguan pada fasilitas publik dan mengirimkan peringatan kepada petugas ketika terjadi upaya pencurian.

"Yang namanya smart itu harusnya sudah bisa melakukan deteksi dini. Misalnya, ketika lampu dilepas atau kabel digunting dan diambil tembaganya, harus langsung masuk alarm. Jadi, diketahui titik mana yang dicuri. Itu yang namanya smart early warning, dan sudah kami usulkan," katanya. (CR-03/PAY)

MUHAMAD ELFAN SETIAWAN/BANTEN POS



Walikota Cilegon dalam kegiatan pelantikan pokja PAUD se-Kota Cilegon, Kamis (5/11).

Pemkot Kaji Wajib Belajar Prasekolah

CILEGON, BANPOS - Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mulai mengkaji penerapan wajib belajar prasekolah sebagai upaya memperkuat pendidikan anak usia dini. Kebijakan tersebut direncanakan memiliki landasan hukum melalui Peraturan Walikota (Perwal) atau Peraturan Daerah (Perda).

Namun, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Selain merumuskan bentuk regulasi, Pemkot Cilegon perlu menyiapkan kesiapan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik agar penerapannya tidak hanya mewajibkan anak mengikuti pendidikan prasekolah, tetapi juga menjamin kualitas pembelajaran.

Walikota Cilegon Robinsar mengatakan, penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD) menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Untuk itu, penyusunan kebijakan wajib belajar prasekolah akan dikoordinasikan dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Kementerian Pendidikan. "Mungkin ke depan juga jadi atensi dengan Perwal atau Perda-nya, agar mewajibkan. Ke depan kita akan rumuskan, berkoordinasi dengan BPMP juga dengan Kementerian," ujarnya, Kamis (5/11).

Menurut Robinsar, keberadaan Bunda PAUD Kota Cilegon yang baru dilantik diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Peran tersebut juga diperlukan untuk menjembatani kebutuhan pendidikan anak usia dini dengan program Dinas Pendidikan. "Harapannya ke depan, adanya Bunda PAUD yang hari ini dilantik itu bisa memfasilitasi, menjembatani dan juga bisa membantu, bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kota Cilegon," katanya.

Selain menyiapkan regulasi, Robinsar menekankan pentingnya pembenahan kualitas layanan PAUD. Pemenuhan fasilitas pendidikan dan peningkatan kompetensi guru dinilai harus berjalan beriringan dengan perluasan akses prasekolah. Ia mencontohkan, kondisi bangunan sekolah yang tidak layak, seperti atap bocor ketika hujan, dapat mengganggu kenyamanan anak saat mengikuti pembelajaran. "Kalau sekolahnya gedungnya masih kurang baik, kurang layak, ketika belajar bocor, hujan, misalkan, kan mengganggu. Makanya minimal dari prasarana kita lengkapi, kualitas gurunya juga terus ditingkatkan," tegasnya.

Sementara itu, Bunda PAUD Kota Cilegon Alfi Rizki Agnia menyebut penguatan pendidikan prasekolah akan menjadi bagian dari prioritas programnya. Salah satu yang akan didorong adalah program Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun, yang diarahkan untuk memperkuat kesinambungan pendidikan sejak usia dini hingga jenjang pendidikan menengah. "Ke depannya program yang akan kami fokuskan terlebih dahulu itu, yaitu program Wajar 13 tahun," ujarnya.

Alfi mengatakan, pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, sebagian orang tua lebih memilih memasukkan anak ke lembaga bimbingan belajar dibandingkan menyekolahkannya di PAUD. "Sekarang ini banyak sekali orang tua di luar sana yang memasukkan anaknya ke les ya dibanding PAUD," tuturnya.

Padahal, pendidikan prasekolah tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan akademik. Pada tahap tersebut, anak juga perlu mengembangkan kemampuan motorik, sosial, dan emosional melalui aktivitas bermain serta interaksi dengan teman sebaya. "Melatih motorik anak juga kurang kalau langsung ke les. Jadi harus diwajibkan untuk masuk sekolah PAUD terlebih dahulu," katanya.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Alfi bersama tim Bunda PAUD berencana melakukan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Bunda PAUD di tingkat wilayah juga akan diarahkan untuk memberikan edukasi kepada orang tua mengenai manfaat pendidikan prasekolah. "Sebagai Bunda PAUD dan juga tim akan terjun ke kecamatan dan kelurahan, dan juga memberikan arahan kepada Bunda PAUD kecamatan kelurahan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat," jelasnya.

Ia berharap, sosialisasi tersebut dapat mendorong semakin banyak orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti pendidikan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Sebab, proses pengenalan lingkungan sekolah dan pembiasaan bersosialisasi menjadi bagian penting dalam perkembangan anak. "Les ini kan kurang bagus ya karena memang mereka langsung memberikan pelajaran yang inti. Kalau di tingkat PAUD kan ada bersosialisasinya terlebih dahulu," pungkasnya. (CR-03/PAY)

Dinkop-UKM Fasilitasi Sertifikasi Halal 28 UMKM

Dianggarkan Rp140 Juta

CILEGON, BANPOS – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop-UKM) Kota Cilegon mengalokasikan anggaran sekitar Rp140 juta untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi 28 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sepanjang 2026. Program tersebut menyasar pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan biaya untuk mengurus sertifikat halal.

Kepala Dinkop-UKM Kota Cilegon Suhendi mengatakan, fasilitasi sertifikasi halal tahun ini dilaksanakan dalam dua gelombang. Sebanyak 10 pelaku usaha telah mendapatkan bantuan pada gelombang pertama, sedangkan 18 UMKM lainnya difasilitasi pada gelombang kedua yang berlangsung Kamis (5/11). "Sertifikasi halal 2026 hari ini merupakan gelombang yang kedua. Hari ini ada 18 pengusaha, rata-rata katering, yang kita fasilitasi untuk sertifikasi halal," katanya.

Menurut Suhendi, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp5 juta untuk setiap pelaku usaha. Dengan jumlah penerima sebanyak 28 UMKM, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp140 juta melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Ia berharap, kepemilikan sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran. Sertifikasi tersebut dinilai penting, terutama bagi usaha katering yang membutuhkan jaminan kehalalan produk. "Dengan adanya sertifikat halal, ke mana pun akan lancar, terutama bagi usaha katering. Kepercayaan konsumen meningkat, omzet bertambah, dan akses pasar juga semakin luas," ujarnya.

Suhendi juga menjelaskan, sertifikasi halal tidak hanya berlaku untuk satu jenis produk. Dalam satu usaha restoran atau rumah makan, pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi untuk beberapa produk sekaligus sesuai ketentuan. "Jadi jangan sampai salah paham, sertifikat halal itu tidak hanya berlaku untuk satu jenis produk saja, tapi satu pelaku usaha bisa mendaftarkan sertifikasi halalnya untuk beberapa produk," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang UMKM Dinkop-UKM Kota Cilegon Heryati mengatakan, program fasilitasi tersebut diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan omzet dan biaya pengurusan sertifikasi. Pendaftaran dilakukan melalui pemindaian QR Code, kemudian calon penerima menjalani proses seleksi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan. "Jadi kami memfasilitasi ini untuk memudahkan teman-teman pelaku usaha, karena rata-rata pelaku usaha mikro omzetnya masih sedikit. Kecuali yang omzetnya sudah mencapai Rp2 miliar, itu bisa membuat secara pribadi," jelasnya.

Pelaku usaha yang tidak masuk dalam daftar penerima fasilitasi akan diarahkan untuk mengurus sertifikat halal secara mandiri. Heryati mengakui, jumlah UMKM yang membutuhkan bantuan tersebut cukup banyak, tetapi kuota penerima harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Adapun proses penerbitan sertifikat halal, menurut Heryati, normalnya membutuhkan waktu sekitar 14 hari. Namun, durasi tersebut dapat bertambah apabila pelaku usaha belum melengkapi dokumen persyaratan. "Untuk sertifikat halal ini sekitar 14 hari. Kalau lebih lama, biasanya tergantung pelaku usahanya, karena kelengkapan berkasnya yang belum selesai," katanya.

Di sisi lain, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Banten Rodani mengatakan, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan agama, tetapi juga menjadi bagian dari jaminan kualitas dan keamanan produk. "Halal itu tidak sekadar halal, tapi juga produk harus sehat dan bersih. Kalau ada bahan yang halal tetapi berdampak tidak baik bagi kesehatan, tim pemeriksa akan memberikan informasi dan arahan kepada pelaku usaha," katanya.

Untuk membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan, LPPOM MUI Banten bekerja sama dengan Pemkot Cilegon memberikan bimbingan teknis. Pendampingan meliputi pengisian formulir, pendataan bahan baku, merek, jenis produk, hingga daftar menu yang diajukan dalam proses sertifikasi. Setelah dokumen disiapkan, tim pemeriksa akan melakukan verifikasi lapangan. Pemeriksaan mencakup asal-usul bahan baku, dokumen kehalalan pemasok, proses produksi, serta fasilitas yang digunakan pelaku usaha. "Misalnya pelaku usaha membeli daging, kami akan memeriksa jenis dagingnya, dari mana membelinya, dan apakah sudah memiliki dokumen halal. Semua bahan harus diverifikasi, termasuk proses produksi dan fasilitasnya," jelas Rodani.

Apabila ditemukan bahan atau proses yang belum memenuhi persyaratan, pelaku usaha akan diminta melakukan perbaikan, termasuk mengganti bahan yang tidak sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan dan verifikasi selanjutnya disampaikan kepada Komisi Fatwa untuk penetapan kehalalan produk. (CR-03/PAY)

MUHAMAD ELFAN SETIAWAN/BANTEN POS



Para pelaku usaha sedang melakukan persyaratan Sertifikasi Halal di Dinkop-UKM Kota Cilegon, Kamis (5/11).

Siaga Sehati, Upaya Puskesmas Cilegon Tekan Stunting dan BBLR

Jangkau 42 Posyandu

CILEGON, BANPOS - UPTD Puskesmas Cilegon, Kecamatan Cilegon, mengintensifkan upaya pencegahan stunting dan bayi berat lahir rendah (BBLR) melalui program inovasi Siaga Sehati atau Kolaborasi Layanan Program Kesehatan Ibu dan Anak Terintegrasi. Program yang mulai berjalan pada 2025 tersebut mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan untuk menjangkau ibu hamil dan balita hingga tingkat posyandu.

Melalui program ini, petugas kesehatan melakukan kunjungan ke 42 posyandu binaan Puskesmas Cilegon. Selain memberikan pelayanan, kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk memetakan persoalan kesehatan ibu dan anak sebagai dasar penentuan sasaran intervensi.

Inovator Siaga Sehati UPTD Puskesmas Cilegon, Irfa Rofiatul Millah, mengatakan, program tersebut melibatkan tenaga promosi kesehatan, petugas gizi, pengelola kesehatan ibu dan anak, dokter umum, hingga dokter gigi. Keterlibatan lintas layanan itu diharapkan membuat penanganan persoalan kesehatan lebih terkoordinasi. "Sasarannya ibu hamil dan balita. Mulai tahun 2025, di posyandu kan banyak sasarannya, terdiri promotor kesehatan, gizi, program ibu, program anak, dokter umum, dokter gigi. Kita roadshow ke 42 posyandu binaan UPTD Puskesmas Cilegon, kita menjangkau semua posyandu di sana dan memetakan masalah," kata Irfa, beberapa waktu lalu.

Pemetaan tersebut menjadi penting karena kasus stunting dan BBLR masih ditemukan di wilayah Kecamatan Cilegon. Berdasarkan data 2025, tercatat 83 anak mengalami stunting atau sekitar 23 persen dari jumlah anak di wilayah tersebut. Sementara itu, kasus BBLR mencapai 28 bayi. "2025 itu, angka real ada 83 anak (stunting), sekitar 23 persen dari jumlah anak di Kecamatan Cilegon. Kalau BBLR target nasional 3 persen, tahun 2025 ada 28 anak di Kecamatan Cilegon. BBLR itu bayi lahir di bawah 2,5 kilogram," paparnya.

Dari hasil pendataan tersebut, Puskesmas Cilegon dapat mengidentifikasi anak yang membutuhkan perhatian dan pelayanan kesehatan lebih lanjut. Upaya yang dilakukan antara lain memastikan anak memperoleh akses pelayanan kesehatan, rutin dipantau melalui posyandu, serta memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. "Minimal, (bayi stunting dan BBLR) dapat pelayanan kesehatan, bisa akses posyandu dan memiliki BPJS Kesehatan. Kunjungan ke 42 posyandu dalam setahun terkunjungi semua," tuturnya.

Selain kunjungan langsung, Siaga Sehati juga menyediakan layanan konsultasi kesehatan melalui aplikasi WhatsApp. Nomor layanan dibagikan kepada masyarakat saat petugas melakukan kunjungan ke posyandu sehingga ibu hamil dan orang tua dapat berkonsultasi tanpa harus datang langsung ke puskesmas. "WhatsApp yang kami bagikan ke warga bisa untuk konsultasi apa pun, terkait kesehatan anak, gizi ibu hamil dan sebagainya, dan ternyata efektif," ujarnya.

Irfa mengatakan, layanan tersebut mendapat respons dari masyarakat. Konsultasi yang masuk antara lain berkaitan dengan balita yang sulit makan, produksi air susu ibu (ASI), hingga informasi jadwal pelayanan puskesmas. Apabila keluhan membutuhkan penanganan khusus, petugas akan mengarahkan masyarakat kepada unit pelayanan yang sesuai. Keluhan darurat, misalnya, diteruskan ke unit gawat darurat (UGD), sedangkan konsultasi keluarga berencana (KB) diarahkan kepada petugas yang menangani layanan tersebut. "Kami kan ke promosi kesehatan, tetapi kalau ada terkait urgensi, nanti kita arahkan ke UGD. Misal ada tanya soal KB, kita arahkan ke orang yang menangani masalah KB di Puskesmas Cilegon. Tugas kita bermanfaat untuk mereka," tuturnya. (CR-03/PAY)

Aktivis Desak Pemkot Serang Konsisten Tertibkan Kos Kosan

SERANG, BANPOS – Pemkot Serang didorong untuk terus memasifkan inspeksi mendadak (sidak) dan penertiban terhadap rumah kos yang diduga disalahgunakan sebagai tempat penyewaan kamar per jam.

Ketua Mahasiswa Taktis Demokratis Wanasalam (MATADEWA), Manarul Hidayat mengatakan, pemerintah harus meningkatkan pemantauan dan pendataan terhadap seluruh rumah kos di Kota Serang.

"Kos-kosan yang marak disalahgunakan di Kota Serang itu harus ditindak. Harus terus melakukan pemantauan, pendataan juga razia-razia agar benar-benar terdata dengan rapi," ujarnya, Kamis (5/11).

Menurut Manarul, maraknya penyewaan kamar kos per jam menjadi salah satu indikasi bahwa pengawasan pemerintah selama ini masih minim. Padahal, jika pengawasan dilakukan secara maksimal, praktik tersebut semestinya dapat dicegah.

"Saya juga sebagai aktivis mendukung penuh kepada Pemerintah Kota Serang khususnya untuk terus menggalakkan razia-razia, bila mungkin setiap minggu atau sesering mungkin dilakukan razia," katanya.

Ia menilai, persoalan penyalahgunaan rumah kos tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), tetapi juga menyangkut norma kesusilaan dan agama. Karena itu, menurutnya, pemerintah memiliki alasan untuk melakukan penertiban secara nyata terhadap tempat kos yang ditemukan melanggar ketentuan.

Manarul juga mengingatkan agar kegiatan sidak tidak hanya dilakukan ketika persoalan sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Sebab, setelah sidak dilakukan, pemerintah harus memastikan adanya tindak lanjut yang jelas.

"Jangan sampai terkesan seremonial. Kemarin ada sidak kos-kosan, hilang lagi, dingin lagi. Jadi, gerakan untuk terus menertibkan itu jangan hanya lagi panasnya doang, tapi benar-benar ingin mendata dan menertibkan sesuatu yang memang dianggap salah," tegasnya.

Selain konsistensi penertiban, ia turut menyoroti minimnya publikasi mengenai hasil sidak yang telah dilakukan oleh dinas terkait. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui sejauh mana hasil pengawasan pemerintah terhadap rumah kos yang diduga disalahgunakan.

"Enggak ada publikasinya, misalnya jumlah kos-kosan yang memang disewakan per jam berapa, terus kemudian ditemukan orang berapa yang dinyatakan tertangkap basah di lokasi itu. Jadi, terkesannya seremonial saja," ungkapnya.

Ia berharap, penertiban yang dilakukan Pemkot Serang dapat memberikan efek jera, baik kepada pemilik maupun pengelola rumah kos serta orang yang menyewa tempat tersebut.

"Harus ada efek jera, baik kepada pemilik kos-kosan atau pengelola kos-kosan maupun kepada orang yang menyewa

BACA AKTIVIS HAL-8

DZIKI OKTOMAULIYADI / BANTEN POS



Sektor industri ritel untuk jaga konsumsi rumah tangga- Warga berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Serang, Kamis (5/11). Kementerian Koordinator Perekonomian mengandalkan sektor ritel untuk menjaga konsumsi rumah tangga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen pada akhir 2026

Andra Tuntut Transparansi Birokrasi

11 Perangkat Daerah Belum Informatif

SERANG, BANPOS – Sebanyak 11 organisasi perangkat daerah (OPD) belum informatif di lingkungan Pemprov Banten pada penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2026. Kondisi itu langsung menjadi perhatian serius Gubernur Banten Andra Soni. Seluruh perangkat daerah diminta tidak menutup akses informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten terhadap 39 OPD, sebanyak 28 OPD masuk kategori informatif. Sementara itu, enam OPD berada dalam kategori menuju informatif dan lima lainnya berstatus cukup informatif.

"Jadikan hasil Monev sebagai dasar pembenahan dan inovasi," tegasnya.

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten menjadi OPD dengan nilai terendah 61,55, disusul Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi senilai 62,94. Kategori cukup informatif juga mencakup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 66,72, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 72,07, serta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 73,67.

Enam OPD menuju informatif meliputi Dinas Pariwisata senilai 89,56, Dinas Sosial 88,63, serta Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

BACA ANDRA HAL-8

DISKOMINFO
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang
Kab. Serang Bahagia
BerAKHLAK
#bangga melayani bangsa











Pemkab Serang Dorong UMKM Terus Berkembang

Ajak Masyarakat Cintai Produk UMKM Lokal

PEMERINTAH Kabupaten Serang menunjukkan optimisme tinggi terhadap perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayahnya. Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menegaskan bahwa Kabupaten Serang memiliki banyak UMKM yang menghasilkan produk layak, dengan produk unggulan yang terkenal seperti batik Kaserangan dan kopi yang terus berkembang pesat.

"Kami ingin memastikan bahwa UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Serang Insya Allah berkembang pesat dan produk yang dimiliki sesuai dengan persyaratan yang ditentukan perusahaan bila ingin dipasarkan lebih luas," kata Bupati Ratu Zakiyah.

"Tadi kita sudah sampaikan ada produk-produk unggulan kami terutama produk kopi dan batik yang kami promosikan. Oleh karena itu di kegiatan ini tadi saya sampaikan, karena tadi juga ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan surat keterangan ekspor. Maka kami ingin memastikan bahwa UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Serang akan berkembang pesat," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengungkapkan perlunya dukungan dari Bea Cukai serta perbankan agar para pelaku UMKM, khususnya eksportir pemula, bisa mendapatkan pendampingan, kemudahan perizinan, pelayanan, serta akses pinjaman modal. Pihaknya berharap Gebyar Produk UMKM ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.

"Alhamdulillah meningkat dan tadi juga kita sudah tanya ke beberapa teman-teman yang sudah mendapatkan surat keterangan ekspor mereka sudah mengekspor beberapa produknya baik ke Eropa maupun ke wilayah-wilayah lainnya," ujarnya.

Pemkab Serang, kata Bupati, sangat mendukung para pelaku UMKM untuk terus berkembang agar tidak hanya mampu memasarkan produk di tingkat lokal, namun juga memiliki kesempatan menembus pasar global. Meski demikian, para pelaku usaha diminta untuk tetap menjaga kualitas produk, kemasan (packaging), perizinan, serta kepastian pasokan.

Terkait strategi pemasaran, produk kopi lokal telah menembus pasar ekspor secara langsung melalui para customer, sementara batik Kaserangan masih dimatifkan untuk pasar lokal. Pemkab telah mengeluarkan surat edaran dan mengimbau para pimpinan perusahaan di wilayah Kabupaten Serang untuk menggunakan batik Kaserangan yang memiliki 12 motif berhak paten.

"Untuk batik kita masih masifkan untuk lokal dulu karena tadi saya sampaikan kepada teman-teman khususnya pada pimpinan perusahaan yang hadir di sini untuk mari kita sama-sama menggunakan produk lokal khususnya batik Kaserangan yang sudah kita dapatkan hak patennya. Ada 12 motif dan itu semua harus kita gunakan khususnya bagi warga yang ada di Kabupaten Serang," kata Bupati.

Bupati juga mengajak agar masyarakat Kabupaten Serang senantiasa bangga menggunakan produk lokal. Oleh karena, hal ini juga menjadi bagian dari semangat mendukung pengembangan ekonomi dari para pelaku UMKM lokal.

"Kalau bukan kita sendiri yang mencintai produk kita, yang membanggakan produk kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kepada seluruhnya, khususnya pada pimpinan perusahaan untuk menggunakan produk lokal khususnya batik Kaserangan," tambahnya.

"Kami terus ingatkan untuk teman-teman atau pimpinan perusahaan untuk menggunakan batik Kaserangan sehingga kalau batik Kaserangan banyak yang menggunakan tentu UMKM khususnya produk batik ini bisa menopang perekonomian keluarga," tegasnya. (ADV)











Produksi Padi Menyusut

Stok Pangan Aman Terkendali

SERANG, BANPOS – Produksi padi lokal di Kota Serang belum sepenuhnya mampu mencukupi seluruh kebutuhan konsumsi masyarakat daerah. Meski hasil panen komoditas tersebut mencapai 80.673,59 ton hingga bulan Oktober 2026, pasokan beras luar tetap dibutuhkan.

Kondisi ketahanan pangan wilayah ini secara umum dinilai masih cukup baik dari aspek ketersediaan stok cadangan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pertanian dan Penyuluhan DKP3 Kota Serang, Irwin Sopyanudin.

"Kondisi ketahanan pangan di Kota Serang saat ini secara umum cukup baik dari sisi ketersediaan pangan. Namun, produksi pangan lokal belum sepenuhnya mampu mencukupi seluruh kebutuhan penduduk," ujar Irwin Sopyanudin kepada BANPOS.

Pemerintah daerah mencatat kebutuhan konsumsi beras penduduk mencapai angka 65.090,88 ton setiap tahunnya secara akumulatif. Kontribusi panen lokal menyumbang 70 persen, sementara 30 persen sisanya bergantung pada pasokan luar daerah.

Berbagai tantangan berat terus menghambat upaya peningkatan hasil pertanian lokal akibat alih fungsi lahan yang masif. Ketersediaan sawah produktif semakin tergerus oleh tekanan pembangunan kawasan permukiman, perdagangan, serta infrastruktur pendukung perkotaan.

"Kondisi ini menjadi tantangan bagi Kota Serang karena peningkatan produksi tidak hanya bergantung pada produktivitas, tetapi juga pada kemampuan mempertahankan luas lahan pertanian yang tersedia," ungkapnya.

Di tengah tantangan tersebut, produksi padi di Provinsi Banten justru menghadapi penyusutan luas panen tahun ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, M. Nasir Daud, memastikan stok pangan daerah masih aman.

Ketersediaan cadangan pangan di wilayah Banten terpantau berada di kisaran angka 4,8 juta ton hingga saat ini. Pemerintah memastikan tidak ada kekurangan pasokan berkat distribusi beras SPHP dari Bulog ke pasar tradisional.

"Terkait ketersediaan pangan di Provinsi Banten, alhamdulillah sampai hari ini kita tidak ada kekurangan. Stok kita masih di kisaran 4,8 juta ton," kata Nasir.

Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di tengah penurunan luas panen. Nilai tukar petani Banten kini telah meningkat dan mencapai angka 114 dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan kesejahteraan petani tersebut mencerminkan terjadinya surplus pendapatan serta daya beli yang semakin menguat di masyarakat. Pemerintah daerah terus berupaya mengejar target kesetaraan nilai tukar agar mendekati angka nasional.

"Dan kita mengejar supaya bisa setara dengan nasional sekitar 134. Dan ini dulu tidak pernah terjadi dan alhamdulillah sekarang nilai tukar petani artinya yang ditanam petani yang dikeluarkan petani itu lebih kecil daripada yang didapat oleh petani," ujarnya.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Yusniar Juliana, memaparkan data penurunan luas panen secara terperinci. Total luas panen padi di Banten sepanjang tahun 2026 diperkirakan mencapai 326,41 ribu hektare.

No	Kecamatan	Luas Baku Sawah (ATR) 2019	Luas Baku Sawah (ATR /BPN No. 446.1/SK-PG.03.03/V/2024)	Luas Alih Fungsi Lahan Sawah (Ha)
1	Curug	932.78	734	198.78
2	Walantaka	1,629.66	1,333	296.66
3	Cipocok Jaya	805.76	581	224.76
4	Serang	385.98	268	117.98
5	Taktakan	466.32	455	11.32
6	Kasemen	4,254.85	3,983	271.85
Total Kota Serang		8,475.34	7,354	1,121.34

LUAS LP2B BERDASARKAN KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG NOMOR 219 TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	LUAS (HA)
1	Kec. Cipocok Jaya	275,76
2	Kec. Curug	653,49
3	Kec. Kasemen	3.711,14
4	Kec. Serang	125,34
5	Kec. Taktakan	358,34
6	Kec. Walantaka	1.094,86
	KOTA SERANG	6.218,92

Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 19,01 ribu hektare atau setara 5,50 persen jika dibandingkan tahun 2025 lalu. Realisasi periode Januari hingga September tercatat seluas 308,67 ribu hektare di seluruh wilayah.

"Realisasi luas panen padi sepanjang Januari-September 2026 mencapai sebesar 308,67 ribu hektare, atau mengalami penurunan sekitar 6,15 ribu hektare (1,95 persen) dibandingkan Januari-September 2025 yang sebesar 314,82 ribu hektare," kata Yusniar. (MPD/AZM)

Dindikbud Kenalkan Sejarah Lewat Dua Program

SERANG, BANPOS – Upaya memperkenalkan sejarah dan warisan budaya daerah kepada generasi muda terus dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang. Salah satunya melalui dua program, yakni Merajut Sejarah dan JAWARA MUDA (Jelajah Warisan Sejarah, Budaya, dan Museum) Kota Serang.

Kepala Bidang Kebudayaan Dindikbud Kota Serang, Ratu Anita Taurina, mengatakan kedua program tersebut dirancang untuk memperkenalkan sejarah sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian warisan budaya daerah.

"Kedua program tersebut dirancang untuk memperkenalkan sekaligus menumbuhkan kesadaran sejarah dan pelestarian warisan budaya kepada masyarakat Kota Serang," ujarnya, Kamis (5/11).

Ia menjelaskan, program Merajut Sejarah lebih banyak mengedepankan pengenalan sejarah dan budaya melalui pemutaran film bertema sejarah dan budaya. Sementara JAWARA MUDA menggunakan pendekatan berbeda dengan mengajak para pelajar mengenal sejarah secara langsung.

"Merajut Sejarah lebih banyak memperkenalkan sejarah dan budaya melalui pemutaran film bertema sejarah dan budaya," jelasnya.

Adapun JAWARA MUDA dikemas dalam bentuk Walking Tour History. Melalui kegiatan tersebut, para pelajar diajak mempelajari sejarah dan budaya secara langsung di lapangan atau melalui metode experiential learning dengan menggunakan Bus Tubagus.

"JAWARA MUDA dikemas dalam bentuk Walking Tour History, yaitu pembelajaran sejarah dan budaya kepada para pelajar secara langsung di lapangan dengan menggunakan Bus Tubagus," katanya.

Menurut Anita, pengenalan sejarah perjuangan Banten juga menjadi bagian penting dari kedua program tersebut. Melalui kegiatan ini, generasi muda diharapkan semakin mengenal perjalanan sejarah daerah dan warisan budaya yang dimiliki.

"Sejarah perjuangan Banten menjadi salah satu yang diperkenalkan di dalam dua program tersebut," tandasnya.

Sementara itu, alumni Sejarah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Rifai, menilai pengenalan sejarah kepada generasi muda memang perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih menarik dan tidak hanya mengandalkan pembelajaran di dalam kelas.

"Program seperti ini bagus karena anak-anak sekarang jangan sampai hanya mengenal sejarah dari buku pelajaran. Mereka juga perlu diajak melihat langsung tempat-tempat bersejarah supaya tahu bahwa Banten punya perjalanan panjang dan nilai perjuangan yang harus dijaga," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pengenalan sejarah tidak hanya menjadi kegiatan seremonial yang dilakukan pada momentum tertentu. Menurutnya, edukasi sejarah harus dilakukan secara berkelanjutan agar generasi muda semakin dekat dengan identitas dan budaya daerahnya.

"Harus ada kesinambungan. Anak-anak perlu terus dikenalkan dengan sejarah daerahnya, mulai dari tokoh perjuangan, peninggalan sejarah, sampai budaya yang masih hidup di tengah-tengah kita," ungkapnya.

Rifai menambahkan, sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan bagian dari identitas suatu daerah yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya.

"Iya, karena sejarah itu bukan hanya urusan masa lalu, tetapi juga menjadi identitas kita. Kalau generasi mudanya tidak mengenal sejarah sendiri, lama-lama mereka bisa kehilangan kedekatan dengan budayanya. Karena itu, program seperti JAWARA MUDA perlu terus dikembangkan dan diperluas jangkauannya," pungkasnya.(ACG/AZM)



SERANG MADANI SATU PETA

Integrasi Geospasial Daerah dan Fondasi Pembangunan Kota Serang

PLATFORM Serang Madani Satu Peta atau SEMESTA menjadi fokus utama pembangunan Simpul Jaringan Geospasial Kota Serang pada tahun 2026. Langkah strategis ini dipaparkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Serang, W. Hari Pamungkas, S.STP., M.Si. Inisiatif itu dibahas dalam Rapat Tindak Lanjut Hasil Studi Tiru Pembangunan Simpul Jaringan Geospasial Kota Serang guna menyatukan data wilayah.

Kebijakan ini mengacu UU Nomor 4 Tahun 2011, PP Nomor 45 Tahun 2021, Perpres Nomor 27 Tahun 2014, dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Selain Permendagri Nomor 5 Tahun 2024, acuan lainnya adalah SEB Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala BIG Tahun 2026. Pada evaluasi BIG Tahun 2026, Kota Serang meraih indeks 1,41 kategori Terbangun dengan prioritas Domain 4 (1,00) dan Domain 5 (1,30).

"Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) menjadi kebutuhan penting dalam mendukung perencanaan dan pembangunan Kota Serang berbasis data kewilayahan," kata Hari.

Hari menyebut penguatan sistem ini mengadaptasi studi tiru Tangerang Satu Peta yang menyatukan 40 OPD, 3 BUMD, dan 10 peta tematik KUGI. Pada tahun 2026, Kota Tangerang mengelola 3.002 data geospasial, 141 aplikasi WebGIS, serta 1.368 layanan peta melalui geoportal terstandar. Komitmen tersebut mengantarkan Simpul Jaringan IG Kota Tangerang meraih status Biru atau Unggul pada SIMOJANG BIG sejak November 2022.





Berkaca dari capaian itu, Kota Serang mengusulkan platform SEMESTA yang mengusung prinsip Satu Peta, Satu Data, dan Satu Kebijakan. Platform ini menjadi ruang bersama seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan agar keputusan diambil atas dasar pengetahuan.

"Tidak ada lagi peta yang berbeda di tiap dinas, angka yang berbeda di tiap laporan, atau kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri," ujar Hari.

SEMESTA merangkum tujuh makna, yaitu Surosowan, Emporium, Madani, Enam Kecamatan, Santri Masjid Agung Banten 1556, Teluk, dan Akses. Rancangan geoportal SEMESTA memuat 256 dataset, 24 peta tematik, 32 produsen data perangkat daerah, serta 1.368 layanan peta interaktif.

Hari menyiapkan sepuluh langkah penguatan, mulai dari penyusunan roadmap, regulasi, kelembagaan Bapperida, Diskominfo, BPS, hingga penganggaran. Pembangunan WebGIS, inventarisasi data prioritas, standardisasi KUGI, metadata, spesifikasi produk, serta peningkatan kompetensi SDM IG juga diprioritaskan. Sinergi antar-OPD dan pendampingan BIG diharapkan meningkatkan kinerja geospasial Kota Serang dari kategori Terbangun menuju level optimal.

"Informasi geospasial perlu diarahkan sebagai instrumen pendukung perencanaan, pengambilan kebijakan, pemetaan potensi dan permasalahan wilayah, serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah," tegas Hari. (ADV)



Andra Tuntut...

Sambungan dari Halaman 7

87,40. Berikutnya terdapat Satpol PP dengan nilai 86,95, Bappeda 85,69, serta BPSDM 84,52. Di sisi lain, lima besar tertinggi diraih Dinas PUPR senilai 99,93, BPKAD 99,90, Diskominfo dan Inspektorat masing-masing 99,87, serta Disperindag 99,80.

"Tapi enggak boleh cuek juga bagi yang belum, nanti kita cuekin juga nanti," tegasnya.

Ketua KI Provinsi Banten Imron Mahrus menjelaskan, penilaian mencakup kualitas informasi, pelayanan informasi, jenis informasi, sarana dan prasarana, komitmen organisasi, serta digitalisasi. Evaluasi usai Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kamis (5/11) itu masih menemukan kesenjangan capaian.

Menurut Imron, kesenjangan dipicu kendala koordinasi internal antara PPID dan bidang-bidang saat menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Maka, dukungan penuh pimpinan diperlukan agar pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) atau kuesioner penilaian mandiri berjalan baik.

"Maka, komitmen pimpinan menjadi faktor penting dalam membangun keterbukaan informasi yang berkelanjutan," sambungnya.

Sementara itu, Andra menilai masyarakat berhak mengetahui pembuatan kebijakan, pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, hingga manfaat pembangunan. Oleh sebab itu, setiap OPD diminta mengoptimalkan website resmi, media sosial, dan saluran digital lainnya. Selain itu, kapasitas PPID wajib diperkuat melalui peningkatan kompetensi, koordinasi, dukungan anggaran, serta sarana dan prasarana.

Transparansi juga berperan strategis mewujudkan visi Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi dalam RPJMD Provinsi Banten 2025–2029. Pemerintahan terbuka memperkuat pengawasan dan partisipasi publik, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta membangun kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, perangkat daerah wajib membangun budaya keterbukaan secara konsisten, bukan hanya saat penilaian atau menerima permohonan.

"Keterbukaan harus menjadi budaya kerja dan menjadi bagian dari integritas setiap penyelenggaraan badan publik," tandasnya.(MPD/AZM)

Aktivis Desak...

Sambungan dari Halaman 7

koskosan itu sendiri. Karena perkara-perkara yang dianggap bertentangan dengan Perda, apalagi dengan aturan agama, itu harus ditegakkan," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, menyebut penyewaan kamar kos per jam bertentangan dengan Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Ketentuan Perizinan Tempat Usaha. Dalam aturan tersebut, pemondokan atau kos-kosan diidentifikasikan sebagai rumah yang terdiri dari kamar-kamar untuk disewakan per bulan atau per tahun, bukan per jam.

Muji juga mengingatkan adanya kewajiban pemilik kos dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sebagaimana diatur dalam Perda Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang diperkuat Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2023.(ACG/AZM)



IPM Terendah...

Sambungan dari Halaman 1

Meski mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir, posisi IPM Lebak belum beranjak dari peringkat terbawah di Banten. Bahkan, capaian tersebut masih terpaut cukup jauh dari Kabupaten Pandeglang yang mencatatkan IPM sebesar 74,64 poin.

Rendahnya IPM Lebak tercermin dari tiga dimensi utama pembangunan manusia, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Pada sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah masyarakat Lebak pada 2026 baru mencapai 7,02 tahun.

Sementara itu, umur harapan hidup tercatat sebesar 74,46 tahun. Adapun pengeluaran riil per kapita masyarakat berada di kisaran Rp10,74 juta per tahun. Capaian ketiga indikator tersebut masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lainnya di Banten.

Persoalan pembangunan manusia tersebut juga beriringan dengan kondisi ketenagakerjaan. BPS mencatat TPT Kabupaten Lebak pada Agustus 2026 mencapai 7,20 persen. Angka itu memang turun dibandingkan Agustus 2025 sebesar 7,30 persen, tetapi masih menempatkan Lebak sebagai salah satu daerah dengan tingkat pengangguran relatif tinggi di Banten.

Sebagai perbandingan, TPT Kota Tangerang Selatan tercatat 4,12 persen, Kota Tangerang 5,86 persen, Kabupaten Tangerang 5,88 persen, Kota Cilegon 6,59 persen, dan Kota Serang 6,86 persen. Sementara Kabupaten Serang mencapai 8,69 persen dan Kabupaten Pandeglang sebesar 8,71 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan angka pengangguran belum cukup untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan di Lebak. Di sisi lain, rendahnya kualitas pendidikan dan daya beli masyarakat menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar kerja.

Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, mengatakan pemerintah daerah bersyukur atas peningkatan IPM yang terjadi dalam satu tahun terakhir. Kenaikan dari 69,24 poin pada 2025 menjadi 70,20 poin pada 2026 dinilainya sebagai perkembangan positif.

Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan, serta pemulihan daya beli masyarakat mulai menunjukkan hasil.

"Kenaikan ini menegaskan bahwa intervensi kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemulihan daya beli masyarakat yang kita gulirkan bersama sudah berada di jalur yang benar (on the right track)," kata Amir kepada BANPOS, Kamis (5/11).

Meski demikian, Amir mengakui peningkatan IPM Kabupaten Lebak masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya berkaitan dengan kondisi geografis wilayah yang cukup luas dengan karakteristik berbeda-beda.

Kabupaten Lebak memiliki 28 kecamatan dan 340 desa/kelurahan. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pemerataan fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, hingga akses ekonomi masyarakat.

"Menjangkau seluruh pelosok wilayah untuk memastikan fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, serta akses ekonomi dasar merata hingga ke garis terdepan tentu memerlukan daya, waktu, dan strategi akselerasi yang bertahap," ujarnya.

Amir menjelaskan, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui sejumlah program strategis. Di antaranya perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, penanganan stunting, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Pemkab Lebak juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan potensi lokal, seperti pertanian, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kita tidak ingin mengejar angka semata dengan jalan pintas. Yang sedang Pemerintah Kabupaten Lebak bangun adalah pembangunan manusia berbasis kualitas yang berkelanjutan," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Lebak dari Fraksi NasDem, Medi Juanda, menilai tingginya angka pengangguran harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan program pelatihan kerja, tetapi membutuhkan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi.

Dia menilai pemerintah daerah perlu membangun iklim investasi yang kondusif agar perusahaan merasa aman dan nyaman menjalankan usahanya di Lebak.

"Ini sangat memprihatinkan masalah pengangguran di Kabupaten Lebak. Upaya yang harus didorong ini perlu kerja sama secara komprehensif antara pemerintah daerah dengan swasta, pendidikan, dan masyarakat," katanya.

Medi mencontohkan hengkangnya PT Parkland World Indonesia (PWI) 6 dari Kabupaten Lebak yang menurutnya berdampak terhadap sekitar 1.300 pekerja. Peristiwa tersebut, kata dia, seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan investasi.

"Seperti yang kemarin PT PWI itu hampir 1.300 pengangguran terjadi karena mereka pindah tempat. Kenapa? Tidak ada kenyamanan dan keamanan yang diberikan, baik itu dari masyarakat ataupun dari pemerintah daerah kepada investor yang mau berinvestasi di Kabupaten Lebak," ujarnya.

Menurut Medi, pemerintah daerah harus mampu menjadi penengah ketika terjadi persoalan antara perusahaan, pekerja, dan masyarakat. Penanganan persoalan di lingkungan perusahaan harus dilakukan secara proporsional agar tidak berujung pada terganggunya kegiatan usaha.

Selain menjaga investasi, dia mendorong pemerintah daerah memberikan kemudahan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga perlu menjajaki kerja sama pemanfaatan lahan tidak produktif untuk kegiatan investasi.

Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal juga harus menjadi prioritas. Medi meminta Dinas Ketenagakerjaan memperbanyak pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Menurutnya, rendahnya rata-rata lama sekolah masyarakat Lebak juga menjadi tantangan dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif. Karena itu, lembaga pendidikan perlu memperkuat keterampilan praktis agar lulusannya memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

"Ke depannya, ayo kita bersama. Saya juga akan memberi masukan kepada pemerintah daerah, kepada Pak Bupati melalui Dinas Ketenagakerjaan, supaya kita juga proaktif menjaga iklim investasi ini supaya nyaman, tenang, dan kondusif," ucapnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak, Rully Chaeruliyanto, mengakui TPT Lebak masih relatif tinggi dibandingkan sejumlah kabupaten/kota lain di Banten. Meski demikian, penurunan dari 7,30 persen pada Agustus 2025 menjadi 7,20 persen pada Agustus 2026 menunjukkan adanya perbaikan.

"Memang kalau kita melihat data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lebak masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Ini tentu menjadi perhatian dan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Lebak," katanya.

Rully menjelaskan, Disnaker telah menjalankan sejumlah program untuk menekan pengangguran, mulai dari pelatihan kerja berbasis kompetensi hingga mempertemukan tenaga kerja dengan yang membutuhkan tenaga kerja.(TQS/ENK)

Dana CSR...

'Sambungan dari Halaman 1

menyampaikannya di sela uji kompetensi pengisian sejumlah jabatan eselon II Pemkot Cilegon yang berlangsung Selasa (3/11).

Andra mengatakan, banyak peran perusahaan swasta dalam membantu pembangunan di Provinsi Banten, salah satunya melalui dana CSR. Akan tetapi, kata di, hal tersebut belum terkoordinasi dengan baik.

"Saya yakin dan percaya sebetulnya perusahaan berperan dalam pembangunan di Banten, namun tidak tercatat, tidak terlihat, oleh karena jtu kita ingin agar semuanya terlihat dan bisa dirasakan dalam pembangunan di Banten," katanya.

Andra mengatakan, saat ini kebutuhan dan tantangan pembangunan sangat besar sementara kemampuan keuangan sangat terbatas, persoalan pembangunan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh APBN dan APBD, salah satu solusinya industri, investasi, dan swasta

"Banten ini lengkap, dekat dengan ibu kota, pantai punya, laut dalam punya, laut dangkal ada, perusahaan banyak, tinggal bagaimana kita mengelolanya sebagai mitra kerja dan harus kita jalin kerja sama yang baik dan saling suport," ujarnya.

Ia juga memastikan, Pemprov Banten akan terus memberikan dukungan penuh untuk membantu perusahaan dalam menyalurkan dana CSR, terutama melalui forum CSR Provinsi Banten. Dengan begitu, diharapkan bantuan tersebut dapat bermanfaat langsung kepada masyarakat.

"Kita komit untuk menjaga investasi di Banten dari berbagai gangguan, salah satunya dari Pungli, makanya kita bentuk forum CSR ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik tinggal kita pelihara kerja sama ini," ujarnya.

Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan (TJSKBLP) atau forum CSR Banten, Jamil mengatakan, lembaganya bekerja sama dengan hampir semua perusahaan di Provinsi Banten. Intinya, membantu menyalurkan dana CSR kepada masyarakat.

"Kita sebagai lembaga yang bekerja sama untuk menyalurkan dana CSR, baik itu untuk pendidikan, sosial, keagamaan, kesehatan dan lainnya," katanya.

Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo mengatakan, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk mengawal penyaluran dana tersebut. Oleh karena itu, dia berpesan agar penyaluran dana CSR berjalan dengan baik dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Kita bisa mengidentifikasi dan menghimpun potensi sumber daya diluar APBD, menyelaraskan kebutuhan dan pembangunan oleh dunia usaha, kita bisa mendorong optimalisasi CSR dari BUMN, BUMD, dan sektor swasta lainnya, serta komitmen bersama agar pembangunan terasa bagi masyarakat," katanya.

"Harus dilakukan secara transparan, aku tabel dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, kami dari DPRD juga akan melakukan pengawasan sebagaimana salah satu tugas kami," sambungnya.

Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon, Masduki, menantang calon pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan potensi pembangunan daerah. Salah satu yang disorot ialah pemanfaatan dana CSR yang dinilai belum maksimal, padahal potensi industri dan sektor usaha di Cilegon cukup besar.

Menurut Masduki, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang nantinya terpilih harus mampu menerjemahkan visi dan misi wali kota ke dalam program konkret. Mereka juga dituntut menghadirkan inovasi, terutama di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi yang membuat pembangunan tidak bisa terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Sekarang kan butuh seorang yang kreatif, bagaimana OPD yang berpendapatan. Butuh inovasi kebijakan, pendekatan-pendekatan yang bagus. Tidak bisa sekarang industri dibiarkan tanpa inovasi. Inovasi-inovasi ini harusnya dilakukan oleh para dinas OPD, kepala-kepala dinaslah," katanya, Kamis (5/11).

Masduki mencontohkan, pembangunan taman dan ruang terbuka hijau (RTH) tidak harus selalu dibiayai APBD. Pemkot dapat membangun kolaborasi dengan perusahaan, perhotelan, perbankan, hingga pengembang perumahan untuk mendukung penyediaan fasilitas publik melalui program CSR.

"Kalau misalkan kita bisa kreatif, membangun taman itu tidak harus menggunakan APBD. Kalau kita studi ke daerah lain, mereka ada dana CSR dari perhotelan apa, bangun di depannya masing-masing," ujarnya.

Menurutnya, pengembang perumahan juga memiliki peluang untuk dilibatkan dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan masing-masing. Kolaborasi tersebut dinilai dapat mengurangi beban pembiayaan pemerintah sekaligus mendorong keterlibatan dunia usaha dalam penataan kota.(CR03/MPD/ENK)

Tersangka Penyadapan...

Sambungan dari Halaman 1

yakni AS dan EH, harus mendapat izin dari Slamet jika akan melaksanakan *provisioning* ataupun penyadapan. Selain itu, pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin kepada Slamet yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan.

"Tersangka SU meng-ACC (menyetujui, red) melakukan penghapusan terhadap *file* hasil penyadapan selama ini," katanya.

Terhadap tersangka Slamet, dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 258 ayat (1) KUHP. Lalu, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE terkait penghapusan sistem informasi elektronik dan Pasal 20 huruf c KUHP. Pasal-pasal itu juga diterapkan kepada ketiga tersangka lainnya.

Adapun tersangka Slamet belum menjalani penahanan lantaran dalam kondisi sakit usai terkena struk.

Dengan ditetapkannya Slamet sebagai tersangka baru, maka total terdapat empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural *(illegal tapping)* dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu mantan Kapolri, Listyo Sigit Pabawo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso dan Slmet Uliandi.

Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha.

Penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP) serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum. Perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu tahun 2025-2026.

Pada hari yang sama, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal, murni proses penegakan hukum. Menurutnya kasus ini tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal institusi.

"Kami yakinkan bahwa ini semua adalah murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau atau apa pun," katanya dalam wawancara cegat usai audiensi bersama Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11).

Suyudi mengatakan bahwa penanganan kasus tersebut murni untuk kebaikan institusi Polri dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, serta negara. Pemimpin Korps Bhayangkara itu juga mengatakan bahwa saat ini Polri sangat solid dan seluruh anggota tetap melaksanakan tugas dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Tentunya untuk seluruh anggota di seluruh wilayah Indonesia untuk tetap bekerja dengan baik, melaksanakan tugas-tugas memelihara kamtibmas, senantiasa bersama masyarakat sesuai dengan slogan kami, yaitu 'Polisi Bersama Masyarakat,'" jelasnya.

Terpisah, dari Banten dukungan terhadap langkah Polri mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto disuarakan Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) Eksekutif Wilayah Banten. Sejumlah pemuda menggelar aksi moral di depan Mapolda Banten, Rabu (4/11) malam, sekaligus mendesak agar perkara tersebut diusut secara transparan dan tanpa intervensi.

Koordinator Lapangan LPI Banten, Kahfi, mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari Aksi Moral Nasional sebagai bentuk apresiasi dan dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

" Aksi ini merupakan bentuk dukungan moral kami kepada Polri agar terus menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional. Kami ingin kepolisian tetap kuat, berintegritas, dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," ujarnya.

Menurut Kahfi, dukungan terhadap institusi kepolisian tidak berarti menutup ruang evaluasi. Justru, penguatan Polri harus disertai pembenahan internal agar kewenangan yang dimiliki tidak disalahgunakan oleh oknum untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

"Kami mendukung Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Namun, profesionalisme, transparansi, integritas, serta pengawasan internal juga harus terus diperkuat. Jangan sampai kewenangan institusi disalahgunakan oleh oknum," tegasnya.

Dalam pernyataan sikapnya, LPI Banten juga menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, menjaga kedaulatan negara, serta memperkuat persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kahfi menyebut, dukungan terhadap pemerintah dan kepolisian harus tetap ditempatkan dalam koridor hukum dan kepentingan bangsa. Karena itu, pihaknya meminta dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden diusut secara objektif dan terbuka.

"Dugaan penyadapan ini harus diusut sampai tuntas. Semua pihak yang terlibat harus diungkap, siapa pun orangnya, tanpa melihat jabatan, pangkat, maupun kedudukannya," katanya.

LPI Banten juga mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak mendapat tekanan atau intervensi dari pihak mana pun. Setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.

"Kami meminta jangan ada intervensi dalam proses penegakan hukum. Kalau memang terbukti ada pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas," lanjutnya.

Selain mendesak pengusutan perkara, LPI Banten mendorong penguatan pengawasan internal Polri untuk memastikan seluruh kewenangan kepolisian digunakan sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, Kahfi mengajak kalangan pemuda dan masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, situasi nasional harus dijaga agar tidak berkembang menjadi perpecahan di tengah masyarakat.

"Kami mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat tetap menjaga stabilitas nasional. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Persatuan dan kepentingan bangsa harus tetap menjadi prioritas," tandasnya.

Melalui aksi tersebut, LPI Banten berharap Polri dapat menuntaskan dugaan penyadapan secara transparan sekaligus terus memperkuat profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.(ANT/MYU/ENK)

Vox Populi...

Sambungan dari Halaman 1

yaitu ayah.

Jujur, ini adalah nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada kami. Dalam waktu yang relatif singkat, Allah menitipkan keturunan kepada kami. Meski masih sama-sama belajar menjadi orang tua, aku dan istri telah menyatakan kesiapan. Bukan karena kami sudah mengetahui segalanya, tapi karena kami siap belajar dan bertanggung jawab atas amanah ini.

Wahai anakku, ayah telah menyiapkan sebuah nama untukmu, Muhammad Zayyan Murtado. Muhammad, pribadi yang terpuji; Zayyan, pribadi yang memperindah kehidupan; dan Murtado, pribadi yang diharapkan memperoleh keridaan Allah SWT.

Nama itu bukan sekadar panggilan, melainkan doa yang akan menyertaimu sepanjang kehidupan. Ayah berharap engkau tumbuh menjadi laki-laki yang berakhlak mulia, membawa kebaikan bagi sesama, dan senantiasa mencari keridaan Allah.

Jika kelak engkau membaca tulisan ini, ketahuilah bahwa ayah telah mencintaimu bahkan sebelum melihat wajahmu. Ayah belum pernah menggenggam tanganmu, tetapi kehadiranmu telah mengajarkan banyak hal tentang cinta dan tanggung jawab.

Terima kasih juga untuk istriku tercinta, Diana Sri Mulyani. Aku tahu, mengandung bukan perkara mudah. Tidurmu tak senyenyak dulu, makanmu tak sebebas dulu, dan gerakmu tak seleluasa dulu. Namun, kau mampu bertahan hingga usia kandungan memasuki bulan kesembilan.

Terima kasih telah berjuang untuk anak kita. Semoga aku mampu menjadi suami yang bertanggung jawab sekaligus ayah yang baik. Aku ingin kelak anak kita mengenal ayahnya sebagai tempat pulang, tempat bercerita, dan tempat menemukan kasih sayang.

Wahai anakku, sebentar lagi kita akan bertemu. Semoga Allah menjadikanmu anak yang saleh, berilmu, dan berakhlak mulia. Semoga keluarga kecil kita menjadi tempat tumbuhnya cinta, doa, dan kebaikan.

Ayah dan ibu sedang menunggumu. Dengan cinta yang telah tumbuh sebelum kita bertemu, dan doa yang akan selalu menyertai setiap langkahmu.*

Pengawasan MBG...

Sambungan dari Halaman 1

makanan, keamanan pangan, dan keberlanjutan pelayanan.

Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Ikhsan Ahmad, menilai banyaknya SPPG yang terkena suspend menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam tata kelola dan pengawasan program MBG. Menurutnya, program yang telah berjalan lebih dari satu tahun semestinya tidak lagi dihadapkan pada persoalan mendasar seperti kelayakan dapur, sanitasi, keamanan pangan, hingga pemenuhan standar gizi.

"Menurut saya, 97 SPPG yang terkena suspend merupakan bukti bahwa tata kelola dan pengawasan MBG masih bermasalah. Setelah lebih dari satu tahun berjalan, persoalan kelayakan dapur, sanitasi, keamanan pangan, dan standar gizi seharusnya tidak lagi terjadi," katanya, Rabu (5/11).

Ikhsan menilai, persoalan yang terus berulang memperlihatkan bahwa persiapan pelaksanaan program belum berjalan optimal. Pemerintah dinilai terlalu berorientasi pada percepatan target dan jumlah penerima manfaat, tanpa diimbangi kesiapan operasional di lapangan.

"Ini menunjukkan kebijakan terlalu berorientasi pada percepatan target dan jumlah penerima, tetapi mengabaikan kesiapan pelaksanaan," ujarnya.

Dia meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap pengelola SPPG yang bermasalah. Bahkan, pengelola yang berulang kali melanggar standar operasional perlu diberikan sanksi tegas hingga diganti. "Pengelola yang berulang kali melanggar standar harus dievaluasi, bahkan diganti. Jangan sampai yang dikejar hanya jumlah porsi, sementara kualitas gizi menjadi nomor dua," ungkapnya.

Menurut Ikhsan, pemerintah daerah tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan program tersebut. Sebab, MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan bagian dari investasi pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, pengamat pendidikan Nurdin juga menyoroti persoalan operasional MBG yang terjadi di SPPG Kota Serang Kagungan Dua. Terhentinya distribusi makanan akibat kendala pencairan dana operasional dinilai harus menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap penerima manfaat.

"Menurut saya, persoalan ini harus menjadi perhatian serius. MBG merupakan program yang menyangkut pemenuhan gizi anak. Jangan sampai persoalan operasional justru membuat anak-anak kehilangan hak untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut," ujarnya kepada BANPOS, Kamis (5/11).

Nurdin juga mempertanyakan keterbukaan pengelola SPPG dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat ketika terjadi gangguan pelayanan. Menurutnya, pengelola harus memberikan penjelasan secara transparan mengenai penyebab persoalan dan langkah penyelesaiannya.

Sementara itu, di Kabupaten Lebak, BGN kembali mengaktifkan tujuh dapur MBG di Kecamatan Malingping yang sebelumnya sempat dihentikan sementara selama dua hari akibat keterlambatan penyampaian Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).

Pencabutan status penghentian operasional tersebut tertuang dalam surat keputusan BGN Nomor 5438/D.TWS/11/2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN pada Kamis (5/11).

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa SPPG telah melengkapi dan mengunggah LPDH secara benar melalui portal Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).

Salah seorang mitra Dapur Cilangkahan 2, Aja Wiharja, membenarkan pencabutan status suspend tersebut. Dengan keputusan itu, seluruh dapur yang sebelumnya dihentikan sementara di Kecamatan Malingping diperbolehkan kembali beroperasi.

"Alhamdulillah, suspend administrasi yang dikeluarkan BGN sudah dicabut untuk semua dapur yang ada di Malingping. Dipastikan seluruh dapur sudah beroperasi kembali hari ini," katanya.(WDO/ACG/MPD/ENK)

Sidang Ijazah Presiden

Bongkar Praktik Massa Bayaran

SERANG, BANPOS – Dugaan pengerahan Massa Bayaran di Sidang Jokowi mencuat sangat tajam di area Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Praktik kotor tersebut terungkap ke publik berkat pengakuan mengejutkan dari seorang warga sipil asal daerah Banten.

Warga bernama Eli mengaku diajak oleh sebuah perusahaan untuk meramaikan aksi dukungan di agenda persidangan. Ia menyebutkan namanya telah tercatat secara resmi bersama barisan rombongan peserta lainnya menuju ke lokasi ibu kota.

"Gatau ini dukung Jokowi apa dukung Gibran, disuruh ikut sudah di-list," kata warga Banten bernama Eli kepada BANPOS, Kamis (5/11).

Tawaran pihak perusahaan perantara tersebut menjanjikan pemberian insentif uang tunai beserta fasilitas pembagian makan siang secara cuma-cuma. Nominal imbalan uang partisipasi kegiatan demonstrasi tersebut diperkirakan menyentuh angka yang terbilang lumayan sebesar seratus ribu rupiah.

Ajakan aksi mobilisasi berbayar itu nyatanya langsung menyasar banyak masyarakat biasa di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Sejumlah rekan kenalannya bahkan dipastikan telah nekat berangkat mengikuti instruksi perusahaan penyelenggara tanpa mengetahui konstelasi agenda politik sebenarnya.

"Pokoknya dapat uang, enggak tahu, Rp100 ribu kali ya? Terus dikasih makan," ungkapnya.

Setelah mempertimbangkan segala risiko dan situasi politik yang memanas, sosok narasumber ini memutuskan mundur teratur dari barisan. Ia merasakan kekhawatiran yang amat besar lantaran tidak memahami detail serta tujuan asli kegiatan mobilisasi sosial tersebut.

Kegagalan keberangkatan ini ternyata tidak menyurutkan semangat puluhan simpatisan bayaran lain yang menetapkan jadwal pergi. Gelombang pergerakan kerumunan warga tersebut ikut memanaskan jalannya pemeriksaan saksi dalam ruang sidang pengadilan negeri di Jakarta.

"Saya batal berangkat, karena takut juga ya. Tapi banyak orang yang saya kenal sih berangkat," tandasnya.

Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hadir memenuhi panggilan resmi pada persidangan saksi tersebut. Mantan kepala pemerintahan itu bertindak membeberkan dokumen riwayat pendidikan untuk melawan tuduhan fitnah keji dari terdakwa Roy.

ISTIMEWA



Momen Jokowi menunjukkan ijazahnya pada persidangan di PN Jakarta Timur.

Sang mantan presiden meminta izin majelis hakim untuk memamerkan semua lembaran dokumen otentik pendidikan formalnya. Berbagai sertifikat mulai tingkatan dasar hingga ijazah lulusan sarjana Universitas Gadjah Mada langsung dipertontonkan guna membungkam kecurigaan.

"Saya sudah berjanji untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah S-1 saya. Mohon Yang Mulia," ujar Jokowi. (MYU/AZM)



Arah Pembangunan Kota Serang

Bapperida Kuatkan Kebijakan Riset



PENYUSUNAN policy brief Kota Serang menjadi agenda utama dalam Rapat Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset pada 5 November 2026. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Serang, W. Hari Pamungkas, S.STP., M.Si. Rapat turut dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang diwakili Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Muda, Deden Hudaedin.

Hadir pula pejabat fungsional analis kebijakan, penelaah teknis kebijakan, analis kebencanaan, administrator kesehatan, penataan ruang, serta analis ketahanan pangan. Selain itu, pustakawan, perencana, periset, dan pejabat fungsional lainnya dilibatkan untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Forum ini membahas dua hasil kajian strategis, berupa pembuatan purwarupa rainwater harvesting dan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat atau SIKM.

"Namun, keberhasilan kajian ini tidak hanya diukur dari tersedianya sebuah purwarupa," kata Hari.

Hari menjelaskan kajian rainwater harvesting bertujuan mengoptimalkan air hujan sebagai sumber air alternatif, konservasi air, dan pengelolaan limpasan permukaan. Pengembangan purwarupa ini memberi dasar teknis mengenai desain, kapasitas, kinerja, dan manfaat sistem pemanenan air hujan sesuai karakteristik Kota Serang.

Penerapan teknologi berkelanjutan didorong melalui proyek percontohan, pedoman teknis, dan regulasi agar direplikasi pada bangunan pemerintah serta fasilitas publik. Sementara itu, kajian kedua melalui SIKM menghimpun penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

"Hasil survei tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengidentifikasi unsur pelayanan yang sudah berjalan dengan baik maupun aspek yang masih memerlukan perbaikan," ujar Hari.

Temuan survei SIKM wajib dievaluasi perangkat daerah untuk memperbaiki waktu pelayanan, kompetensi petugas, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana. Kedua kajian ini menegaskan bahwa kebijakan harus dibangun sistematis mulai dari identifikasi masalah, analisis bukti, hingga implementasi dan evaluasi.

Bapperida memastikan hasil penelitian, pengkajian, dan perekayasaan tidak berhenti pada laporan administratif semata, melainkan menjadi rekomendasi yang aplikatif. Dokumen policy brief wajib memuat permasalahan utama, bukti pendukung, rekomendasi realistis, perangkat daerah yang berperan, serta indikator keberhasilan. Masukan dari Deden dan seluruh peserta memastikan komitmen perangkat daerah terintegrasi melalui mekanisme perencanaan serta penganggaran yang berlaku.

"Oleh karena itu, penyusunan policy brief dari kedua kajian ini dapat dilakukan secara tajam, ringkas, dan berorientasi pada pengambilan keputusan," tegas Hari. (ADV)





ISTIMEWA



Hari ke 11 operasi Patuh Maung di Wilayah Hukum Polda Banten

Polda Banten Perkuat Edukasi Tertib Berlalu Lintas

SERANG, BANPOS – Polda Banten senantiasa berupaya menekan angka pelanggaran dengan Perkuat Edukasi lalu lintas ke ruang lingkup lingkungan pemukiman masyarakat. Langkah krusial ini dilakukan secara konsisten di tengah tren penurunan jumlah insiden kecelakaan pada periode pelaksanaan Operasi Patuh Maung 2026.

Kegiatan optimalisasi bimbingan tersebut dilakukan secara masif saat penyelenggaraan operasi itu telah memasuki fase hari kesebelas pada Kamis (5/11). Satuan penegak hukum menyadari perlunya menjangkau edukasi langsung ke tingkat basis warga agar kebiasaan mematuhi aturan terbangun dari rumah.

"Dari data yang dilaporkan jajaran Polres, sudah terlihat dampak positif berupa penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas. Namun, masih ada beberapa wilayah yang mengalami kejadian kecelakaan. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama agar langkah pencegahan dapat terus ditingkatkan," ujarnya.

Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Banten Kompol Muhammad Cuaib guna mengevaluasi efektivitas operasi penertiban. Data dari seluruh polres jajaran telah menunjukkan penurunan signifikan jumlah laporan insiden di jalanan, namun kewaspadaan petugas tidak boleh mengendur.

Menurut aparat perwira menengah tersebut, indikator keberhasilan dari pelaksanaan operasi kepolisian bukan sebatas tingginya angka kuantitas penindakan tilang pelanggar. Peningkatan kualitas kesadaran yang tumbuh kuat pada nurani tiap pengendara merupakan target hakiki dari rangkaian panjang sosialisasi disiplin yang dilakukan.

"Salah satu tolok ukur keberhasilan operasi adalah tidak terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, saya tekankan kepada Satgas Preemtif agar lebih mengoptimalkan pencegahan dini. Sasarannya tidak hanya di jalan raya, tetapi juga di lingkungan tempat tinggal masyarakat, sehingga kita dapat membangun kesadaran tertib berlalu lintas sebelum mereka beraktivitas dan berkendara di jalan," tegasnya.

Instruksi tegas telah diteruskan secara vertikal kepada Satuan Tugas Preemtif guna mendeteksi kebiasaan buruk warga sebelum terjun ke ruas jalan. Imbauan simpatik harus terus-menerus disebarluaskan oleh segenap barisan personel di lapangan demi mereduksi angka risiko jatuhnya korban fatalitas kecelakaan kendaraan.

Kedisiplinan serta kepatuhan komprehensif seluruh lapis komponen sosial sangat diharapkan demi menjaga kelancaran dinamika aktivitas publik ibu kota provinsi banten. Jaminan keamanan dan terwujudnya jalinan ketertiban ini menjadi prioritas utama demi menyelamatkan tiap nyawa penerus masa depan bangsa. (MYU/AZM)



ANTARA



Pekerja memanggul karung berisi beras hasil penyerapan dari petani di Gudang Bulog Indramayu, Jawa Barat, Senin (2/11).

STOK MELIMPAH, HARGA BERAS MASIH TINGGI

JAKARTA, BANPOS - Lembaga kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memaparkan empat faktor yang menyebabkan harga beras masih tinggi meskipun cadangan beras pemerintah mencapai 4,56 juta ton pada Oktober 2026.

Dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Kamis (5/11) Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF Afaqa Hudaya mengatakan tingginya stok beras pemerintah belum sepenuhnya menjamin ketersediaan pasokan di pasar maupun keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Menurut dia, salah satu faktor yang menyebabkan harga beras masih tinggi adalah stok yang terkonsentrasi di gudang pemerintah sehingga tidak seluruhnya langsung tersalurkan ke pasar.

Penyerapan gabah dalam jumlah besar oleh Bulog saat panen juga menurutnya menyebabkan gabah yang beredar di penggilingan menipis.

"Jadi ketika panen menyusut karena El Nino, penggilingan saling berebut gabah yang terbatas sehingga harga gabah naik dan harga beras di pasar juga ikut naik," kata Afaqa.

Kedua, ia menjelaskan volume intervensi pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih relatif kecil.

Ia menyebutkan penyaluran SPHP pada Oktober 2026 tercatat hanya 123 ribu ton atau kurang dari sekitar lima persen perkiraan kebutuhan konsumsi beras nasional dalam sebulan.

Ketiga, Afaqa menyebutkan terdapat kebocoran distribusi berupa praktik pengemasan ulang beras SPHP menjadi beras premium untuk dijual dengan harga lebih mahal. Praktik tersebut membuat sebagian beras bantuan tidak sampai kepada konsumen sesuai harga yang ditetapkan.

Keempat, penyimpanan stok dalam waktu terlalu lama berisiko menurunkan kualitas beras sehingga kurang diminati masyarakat dan mengurangi efektivitas operasi pasar.

Afaqa mencatat rata-rata harga beras medium pada Oktober 2026 mencapai Rp14.677 per kilogram, melampaui harga eceran tertinggi (HET) zona 1 sebesar Rp13.500 dan zona 2 sebesar Rp14.000 per kilogram.

Dia menilai pemerintah perlu memperbesar penyaluran SPHP secara bertahap, terutama ke provinsi dengan inflasi pangan tinggi, serta memperketat pengawasan distribusi dan memberikan sanksi terhadap praktik pengemasan ulang beras SPHP.

Ia menekankan ketahanan pangan seharusnya diukur dari keterjangkauan harga di pasar, bukan sekadar besarnya stok beras di gudang.(ANT/RUS)

BRIN Tekankan Pentingnya Pengelolaan Mineral Kritis Berkelanjutan



Nunung Nuryartono

JAKARTA, BANPOS - Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nunung Nuryartono menekankan pentingnya riset dan inovasi untuk mendukung pengelolaan mineral kritis yang berkelanjutan.

"BRIN memandang bahwa dukungan terhadap tata kelola mineral kritis harus diperkuat melalui riset lintas disiplin yang tidak hanya mengembangkan teknologi pengolahan, tapi juga menyediakan berbagai bukti ilmiah mengenai persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak kita harapkan muncul," ujar Nunung dalam acara "Forum Mineral Kritis Multipihak Indonesia 2026" yang digelar di Jakarta, Kamis (5/11).

Persoalan tersebut, tutur Nunung melanjutkan, meliputi dampak lingkungan, dampak sosial, serta bagaimana proses efisiensi pemanfaatan sumber daya tepat dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

Oleh karena itu, Nunung menegaskan pentingnya kerja sama antarsektor dalam pengelolaan mineral kritis.

Nunung menyampaikan, dalam mengembangkan teknologi pengolahan logam tanah jarang (LTJ), BRIN bekerja sama dengan Badan Industri Mineral (BIM), MIND ID, hingga berbagai perguruan tinggi yang berada di luar maupun dalam negeri.

Nunung berharap agar kolaborasi tersebut dapat menghasilkan pengembangan teknologi pengolahan LTJ yang sesuai dengan karakteristik sumber daya mineral Indonesia.

Selain itu, ia juga berharap dapat memandirikan anak-anak bangsa dalam penguasaan teknologi-teknologi tersebut.

"Namun demikian, kami tidak bisa sendiri. Pengembangan teknologi membutuhkan investasi yang besar, kerja sama antarsektor, dan dukungan kebijakan yang konsisten," ucap Nunung.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif The PRAKARSA sekaligus Koordinator Koalisi ResponsiBank Indonesia Victoria Fanggidae menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari besarnya investasi dan kapasitas industri pengolahan.

Ia menekankan tiga perubahan mendasar, yakni penguatan standar operasional dan penegakan hukum, peningkatan akuntabilitas lembaga keuangan, serta pembagian manfaat ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat terdampak.(ANT/RUS)

OJK Sidik Empat Entitas Diduga Pialang Asuransi Tanpa Izin

JAKARTA, BANPOS - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan penanganan empat entitas yang diduga menjalankan usaha pialang asuransi tanpa izin telah memasuki tahap penyidikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan perkembangan itu dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Oktober 2026 secara daring di Jakarta, Kamis (5/11).

"Selain itu, terdapat empat entitas yang diduga menjalankan kegiatan usaha perusahaan pialang asuransi tanpa izin yang penanganannya telah dilimpahkan kepada penyidik OJK dan saat ini telah memasuki tahap penyidikan," kata Ogi.

Di sisi lain, pendalaman terhadap dugaan kegiatan usaha pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin masih dilakukan terhadap 15 entitas hingga Oktober 2026.

"Hingga Oktober 2026, sebanyak 15 entitas telah menjadi objek pendalaman dan jumlah tersebut berpotensi bertambah seiring dengan diperolehnya informasi dan data terakhir," ujar dia.

Otoritas tersebut juga menyatakan telah menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan pihak terindikasi menjalankan usaha pialang asuransi atau reasuransi tanpa izin.

Penanganan dugaan tindak pidana di sektor perasuransian diperkuat melalui pengumpulan dan verifikasi bukti agar setiap indikasi pelanggaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, pada Juli 2026, penelusuran dugaan praktik kepialangan tanpa izin dilakukan melalui informasi sumber bisnis perusahaan asuransi, penelusuran jejak digital, serta koordinasi dengan pengawas terkait.

Sebagai langkah pencegahan, implementasi kode QR pada Surat Tanda Terdaftar (STTD) pialang asuransi dan reasuransi mulai diterapkan pada 4 Mei 2026 untuk mempermudah pemeriksaan identitas serta status pendaftaran.

Berdasarkan data per 31 Maret 2026, terdapat 560 pialang asuransi dan 105 pialang reasuransi yang terdaftar serta memiliki STTD. Verifikasi melalui kode QR diharapkan mengurangi risiko masyarakat menggunakan jasa pihak yang tidak terdaftar.

Dari sisi penguatan kelembagaan, sebanyak 188 dari 220 perusahaan penunjang perasuransian, atau 85,45 persen, telah memenuhi ketentuan minimum ekuitas tahap pertama tahun 2026 berdasarkan laporan triwulan II. Kelompok ini mencakup perusahaan pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi.

Adapun aset industri asuransi per September 2026 mencapai Rp1.192,84 triliun, tumbuh 0,98 persen secara tahunan. Akumulasi pendapatan premi asuransi komersial tercatat Rp252,80 triliun, meningkat 2,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.(ANT/RUS)

Realisasi Investasi di Kota Tangerang Melebihi Target 2026

TANGERANG, BANPOS - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang, menyebutkan realisasi investasi hingga triwulan ketiga telah mencapai di atas target tahun 2026.

"Target investasi tahun 2026 sebesar Rp15,15 triliun, realisasi hingga triwulan ketiga sudah mencapai Rp18,12 triliun," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja di Kota Tangerang, Kamis (5/11).

Suggiharto menjelaskan capaian investasi khusus pada periode triwulan ketiga 2026 sebesar Rp6,39 triliun dengan serapan tenaga kerja yakni 11.142 orang untuk berbagai sektor usaha.

Adapun realisasi investasi Rp6,39 triliun mencakup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp3,04 triliun serta Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp2,44 triliun.

Selain itu, Pemkot Tangerang berharap capaian tersebut dapat terus memperkuat iklim investasi yang positif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan dampak perluasan kesempatan tenaga kerja dalam beberapa tahun ke depan.

"Capaian realisasi investasi secara kumulatif berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan," katanya.

Sedangkan Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan kemudahan berusaha merupakan salah satu kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja.

ANTARA



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja.

Ia meminta perangkat daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan tidak membuat proses investasi menjadi rumit.

"Saya tegaskan kepada perangkat daerah terkait perizinan, jangan ada yang dipersulit. Semua harus dipermudah, didekatkan dan dipercepat. Karena ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja," ujar Sachrudin.(ANT/RUS)

BANPOS CHANNEL | WWW.BANPOS.CO | BANTENPOS@GMAIL.COM | BANTEN_POS | BANTEN POS

KERTAS DATA PRIBADI JADI PEMBUNGKUS GORENGAN

Disdukcapil Telusuri Tercecernya Dokumen Kependudukan

TANGERANG, BANPOS - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemkab Tangerang, akan menelusuri dokumen kependudukan resmi berisikan data pribadi yang dikeluarkannya, ditemukan tercecer sebagai pembungkus gorengan oleh warga DKI Jakarta.

Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Nuryadi di Tangerang, Kamis (5/11) mengatakan dokumen berupa berita acara pembatalan akta ini dipastikan merupakan produk administrasi tahun 2021.

"Kalau dicek itu, produk itu tahun 2021, Mas. Saat itu saya belum jadi Kepala Bidang Capil. Saya baru menjabat Kabid Capil pada 2023," ujar Nuryadi.

Penemuan dokumen penting tersebut, menjadi perbincangan luas di media sosial (medsos) dengan akun Treads @mrdani_4877. Di mana, dalam unggahannya kertas pembungkus gorengan itu memperlihatkan kop resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan formulir pelayanan administrasi "Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran"

Bahkan, dokumen itu lengkap dengan bagian kolom identitas nama, alamat, nomor kontak, hingga catatan pinggir bertuliskan detail keputusan pencatatan sipil dan memicu reaksi sejumlah warga jagat maya khususnya terkait keamanan dan perlindungan data pribadi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) membenarkan dokumen kependudukan dikeluarkan secara resmi dari instansinya.

Nuryadi mengungkapkan, dokumen yang ditemukan di bungkus gorengan tersebut memuat tanda tangan Kepala Disdukcapil itu tercatat sebagai warga Kelapa Dua.

Ia menambahkan bagaimana dokumen resmi instansi pemerintahan bisa jatuh ke tangan pedagang gorengan, pihaknya menduga kebocoran atau tercecernya berkas tersebut belum bisa dipastikan akibat adanya kelalaian di internalnya.

Pasalnya, kata Nuryadi, dokumen kependudukan tidak hanya dipegang oleh instansi, tetapi juga dipegang langsung oleh warga yang bersangkutan.

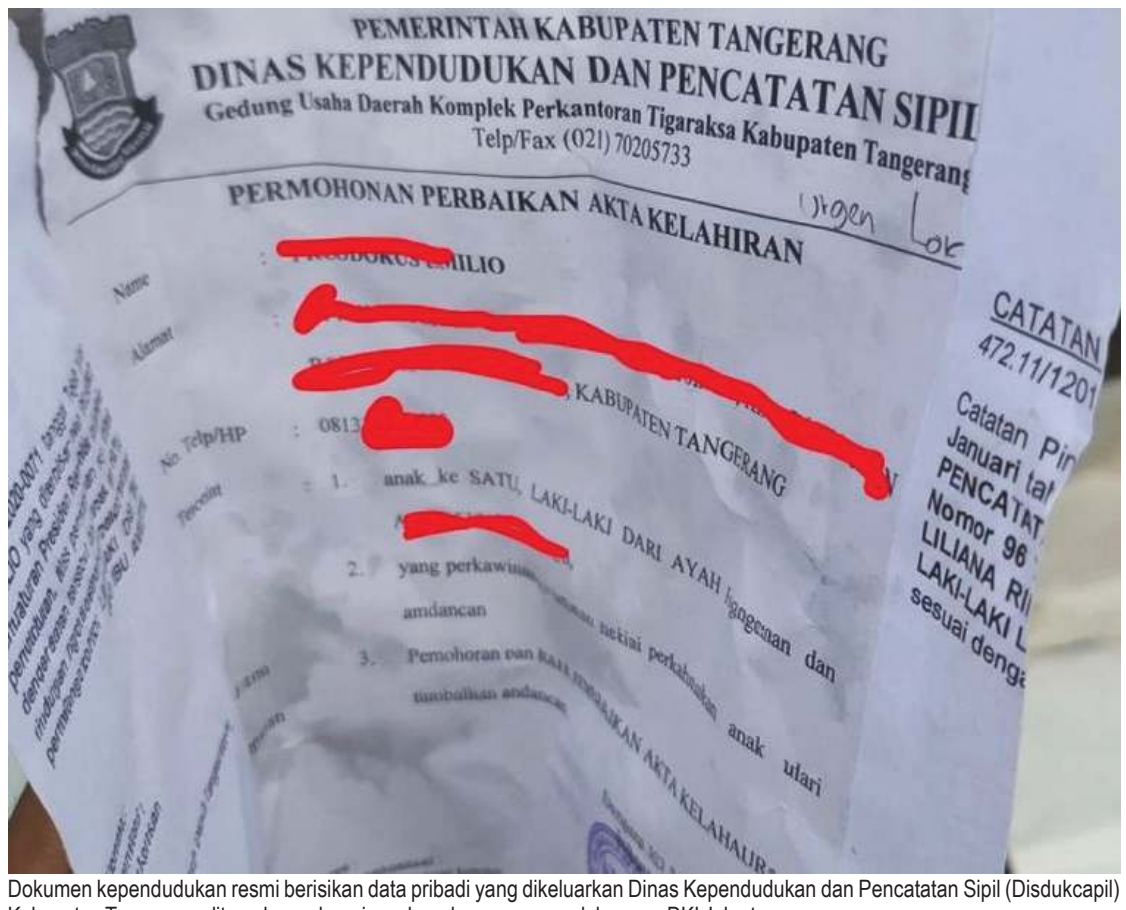
"Kemungkinan bisa kelalaian itu dari yang bersangkutan juga, karena tidak mungkin arsip kita cecerkan ke tukang gorengan. Bisa saja yang bersangkutan sedang fotokopi di daerah tersebut, lalu tertinggal atau bagaimana kita tidak tahu," paparnya.

Nuryadi menambahkan, untuk penyimpanan arsip resmi terkait akta dan produk pencatatan sipil berada di bawah kewenangan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK/PDIP).

Sehingga, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi untuk melakukan investigasi terkait persoalan tersebut.

"Kalau secara sistem dan penyimpanan di kita pasti aman. Namun, kami menyayangkan adanya dokumen yang tercecer ini," kata Nuryadi.(ANT/RUS)

ANTARA



Dokumen kependudukan resmi berisikan data pribadi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang, ditemukan sebagai pembungkus gorengan oleh warga DKI Jakarta.

Giliran PKL Jalan Abdullah Ditertibkan

TANGERANG, BANPOS-Pemerintah Kota Tangerang melanjutkan proses penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Anyar Kecamatan Tangerang. Usai merelokasi PKL di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kiasnawi, kali ini giliran pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Abdullah, Sukaasih, Kecamatan Tangerang disasar.

Proses penertiban dilakukan oleh kembali petugas gabungan Satpol PP Kota Tangerang bersama Trantib Kecamatan Tangerang pada Kamis (5/11). Penertiban diklain merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menata kawasan sekitar Pasar Anyar agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Camat Tangerang, Riswan Setyo Kardinto, melalui jajaran Trantib Kecamatan Tangerang terus mengoordinasikan pengawasan dan penertiban di wilayahnya. Langkah ini juga menjadi tindak lanjut penataan kawasan Pasar Anyar, khususnya untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang digunakan untuk aktivitas berjualan.

"Penertiban di Jalan Abdullah menjadi bagian dari upaya memperluas penataan, sehingga kegiatan perdagangan dapat berlangsung di lokasi yang semestinya tanpa mengganggu akses jalan dan kenyamanan pengguna jalan," ungkap Riswan.

"Dalam hal ini, yaitu penertiban yang terus merata tidak hanya pada Jalan Kiasnawi dan Jalan Ahmad Yani saja. Tapi penertiban PKL yang berada diseluruh Kawasan Pasar Anyar secara bertahap akan terus ditertibkan," tambahnya.

Pemerintah Kota Tangerang berharap penataan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan ini dapat menciptakan kawasan Pasar Anyar yang lebih tertib, aman, dan nyaman, baik bagi pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitarnya. "Kami meminta dukungan dan kerja sama semua pihak, mulai dari masyarakat sekitar khususnya mereka para pedagang. Yakni, untuk mau masuk ke dalam Gedung Pasar Anyar dan membangun ekosistem ekonomi yang lebih sehat, bersih dan nyaman untuk semua pihak," tutupnya. (MADE/RUS/BNN)

Imigrasi Soetta Amankan 11 WNA Diduga Langgar Izin Tinggal

TANGERANG, BANPOS - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten mengamankan sebanyak 11 orang warga negara asing (WNA) yang diduga melanggar keimigrasian terkait izin tinggal dalam operasi gabungan di Cengkareng dan Kosambi pada Rabu (4/11).

Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Komang Trisna Diatmika di Tangerang, Banten, Kamis (5/11), mengatakan belasan WNA tersebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan lanjutan secara intensif oleh petugas keimigrasian.

"Dari operasi ini, kami memeriksa lebih lanjut 11 warga negara asing. Tindak lanjut untuk setiap orang akan kami tentukan berdasarkan hasil pemeriksaan," katanya.

Ia mengungkapkan pada pelaksanaan operasi tersebut, sebanyak 77 personel dikerahkan dengan menyasar sejumlah lokasi perusahaan serta apartemen di dua wilayah berbeda.

Komang melanjutkan dari hasil penindakan di lapangan, terdapat 11 WNA yang diamankan terdiri atas delapan warga negara China, dua warga negara Pakistan, dan satu warga negara Nigeria.

ANTARA



Petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten melakukan operasi gabungan pemeriksaan dokumen keimigrasian bagi WNA di Cengkareng dan Kosambi pada Rabu (4/11).

Ia mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, lima WNA asal China itu masing-masing berinisial WQ, HL, HH, XS, dan YJ diduga kuat menyalahgunakan izin tinggal.

"Mereka dijerat dengan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," ucapnya.

Sementara itu, dua WNA asal Pakistan berinisial MAS dan FM diduga melanggar Pasal 71 huruf a UU Keimigrasian karena lalai tidak melaporkan perubahan alamat tempat tinggal mereka.

"Selain itu, petugas juga masih mendalami indikasi ketidakpatuhan aturan terhadap tiga WNA China berinisial YC, FC, dan YW serta satu WNA Nigeria berinisial CKE," ujarnya.

Komang menyebut seluruh hasil pendalaman tersebut nantinya akan menjadi landasan hukum dalam penentuan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sesuai Pasal 75 ayat (1) UU Keimigrasian.

"Kami tidak mentoleransi setiap bentuk pelanggaran keimigrasian. Pengawasan ini dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga ketertiban masyarakat sekaligus memastikan setiap temuan di lapangan ditindaklanjuti secara prosedural sejalan dengan semangat Imigrasi untuk rakyat," kata dia.(ANT/RUS)

Rogo, Alumni Tembus "Pasar Kerja" Jepang

BNN



TANGERANG, BANPOS - Pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Tangerang mengantarkan Rogo menembus pasar kerja internasional.

Berbekal kompetensi yang diperoleh di BLK Cibodas, ia kini bekerja di Jepang.

Kisah Rogo menjadi gambaran bagaimana pelatihan keterampilan dapat membuka jalan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, bahkan hingga ke luar negeri.

Pengalamannya tersebut turut menjadi sorotan dalam Gebyar BLK Kota Tangerang 2026 di Tangerang Convention Center, Rabu malam (5/11).

Dalam kegiatan yang dibuka Wali Kota Tangerang Sachrudin itu, Rogo hadir secara virtual melalui sambungan video conference dari Jepang. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Sachrudin untuk berinteraksi langsung dengan salah satu alumni BLK yang berhasil bekerja di luar negeri.

Sachrudin mengatakan, keberhasilan Rogo membuktikan bahwa pelatihan keterampilan dapat menjadi modal penting untuk memperluas kesempatan kerja. Karena itu, Pemkot Tangerang terus mendorong peningkatan kompetensi masyarakat melalui program unggulan Gampang Kerja.

"Ini membuktikan bahwa keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan dapat menjadi bekal untuk meraih peluang kerja hingga ke luar negeri. Kita ingin semakin banyak warga Kota Tangerang memiliki kompetensi, keberanian, dan kesempatan untuk bersaing, baik di tingkat nasional maupun internasional," ujarnya.

Menurut Sachrudin, BLK tidak sekadar menyediakan pelatihan gratis, tetapi juga menjadi penghubung antara kemampuan pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha maupun industri.

Karena itu, kualitas pelatihan harus terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja. Kolaborasi dengan dunia industri dan pendampingan alumni juga perlu diperkuat agar keterampilan yang diperoleh benar-benar berujung pada pekerjaan atau usaha produktif.

"BLK memiliki peran strategis, bukan hanya memberikan pelatihan gratis, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan keterampilan masyarakat dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Tujuannya adalah melahirkan SDM yang produktif, mandiri, dan berdaya saing," jelasnya.

Sementara itu, Rogo mengaku bersyukur atas kesempatan mengikuti pelatihan di BLK Kota Tangerang hingga akhirnya memperoleh peluang bekerja di Jepang. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, jajaran Dinas Ketenagakerjaan, serta ibunya yang terus memberikan dukungan dan doa.

"Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Wali Kota dan jajaran Disnaker atas kesempatan menimba ilmu di BLK serta apresiasi yang diberikan malam ini. Terima kasih juga kepada ibu yang selalu mendoakan.

Semoga saya dapat bekerja dengan baik dan memberikan yang terbaik di sini (Jepang) dan membanggakan Kota Tangerang juga Indonesia," ungkapnya melalui video conference.

Selain menjadi ajang apresiasi bagi alumni yang berhasil memasuki dunia kerja, Gebyar BLK 2026 juga menampilkan kreativitas peserta pelatihan. Di antaranya, karya tata boga bertema Kreasi Rasa Nusantara dan tata busana bertema Romantic Night.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Tangerang mendorong BLK tidak hanya menjadi tempat masyarakat memperoleh keterampilan, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju kemandirian ekonomi dan kesempatan kerja yang lebih luas, termasuk di pasar internasional. (MADE/RUS/BNN)